

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PANGAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2016 - 2021

PADANG, Desember 2017

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka terjadi perubahan regulasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan berdampak terhadap Kebijakan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, dan selanjutnya dengan Perda Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana Badan Ketahanan Pangan berubah menjadi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, dengan demikian harus dilakukan perubahan terhadap Renstra tersebut menjadi Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021.

Perubahan yang dilaksanakan dalam Renstra ini adalah mulai tahun 2018 – 2021, sedangkan untuk tahun 2016 – 2017 masih memakai Renstra Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 – 2021. Dalam hal ini dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran serta indikator yang akan dicapai sampai dengan tahun 2021. Namun demikian kami menyadari bahwa Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 ini masih terdapat kekurangan dan memerlukan penjabaran lebih lanjut, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaannya.

Semoga perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan terhadap perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Dengan selesainya perubahan Renstra ini dapat dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dibidang pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan.

Padang, Desember 2017

**KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



T
EFENDI, MP
Pembina Utama Madya
19630515 199003 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN	8
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi	8
2.2. Sumberdaya Dinas Pangan.....	13
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan..	45
BAB 3 ISU – ISU STRATEGIS	47
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan	47
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	50
3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra	52
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis....	54
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	57
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	59
4.1. Visi dan Misi Dinas Pangan	59
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	60
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	61
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	64
5.1. Program Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat	64
5.2. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pangan	65
BAB 6 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.2.1	Rincian Aset Tetap Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	14
2.3.1	Pencapaian Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	17
2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	20
2.3.3	Perkembangan Produksi Komoditi Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 s/d 2016	25
2.3.4	Ketersediaan Energi Untuk Dikonsumsi Penduduk di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2016	26
2.3.5	Ketersediaan Protein untuk Dikonsumsi Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2016	27
2.3.6	Target Konsumsi Pangan dan PPH s/d Tahun 2020	28
2.3.7	Realisasi Konsumsi Pangan dan Skor PPH Penduduk Sumatera Barat Tahun 2012 – 2015	28
2.3.8	Lokasi Penerima Dana Bansos Lumbung Pangan Tahap Mandiri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2015	31
2.3.9	Lokasi Penerima Dana Bansos Lumbung Pangan Tahap Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 – 2015	31
2.3.10	Lokasi Penduduk Dengan Resiko Ringan, Sedang dan Berat Terjadinya Rawan Pangan berdasarkan Peta FSVA Provinsi Sumatera Barat	34
2.3.11	Lokasi Penerima Dana Penangan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2016	35
2.3.12	Alokasi Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2012	37
2.3.13	Kawasan Mandiri Pangan Provinsi Sumatera Barat	39
2.3.14	Alokasi Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2016	40
2.3.15	Persentase perkembangan harga rata-rata komoditi pangan tingkat produsen dan tingkat konsumen di Sumatera Barat Tahun 2010 s/d 2015.....	42
2.3.16	Rekap Toko Tani Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	43
2.3.17	Alokasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 – 2015	44
3.1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	48
3.2.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	52

3.3.1	Komposisi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Terhadap Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.....	54
3.4.1	Indikasi Pusat Kegiatan Pengembangan Pertanian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 – 2029	56
3.4.2	Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi	57
4.2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021	60
4.2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	62
5.2.1	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021	66
6.2.1	Indikator Kinerja Dinas Pangan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	77

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
2.2.1 Kekuatan Pegawai di Dinas Pangan Berdasarkan Golongan (Tahun 2015)	13
2.2.2 Kekuatan Pegawai di Dinas Pangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal (Tahun 2015)	14
2.3.1 Realisasi Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hr) Masyarakat Sumatera Barat Tahun 2012 – 2015	29
2.3.2 Realisasi Protein (Gram/Kap/Hr) Masyarakat Sumatera Barat Tahun 2012 – 2015	29
2.3.3 Perkembangan dana bantuan sosial Lumbung Pangan Tahap Mandiri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2015	32
2.3.4 Perkembangan LDPM Tahap Penumbuhan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pangan	2
2	Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	9
3	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Sumatera Barat	33

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

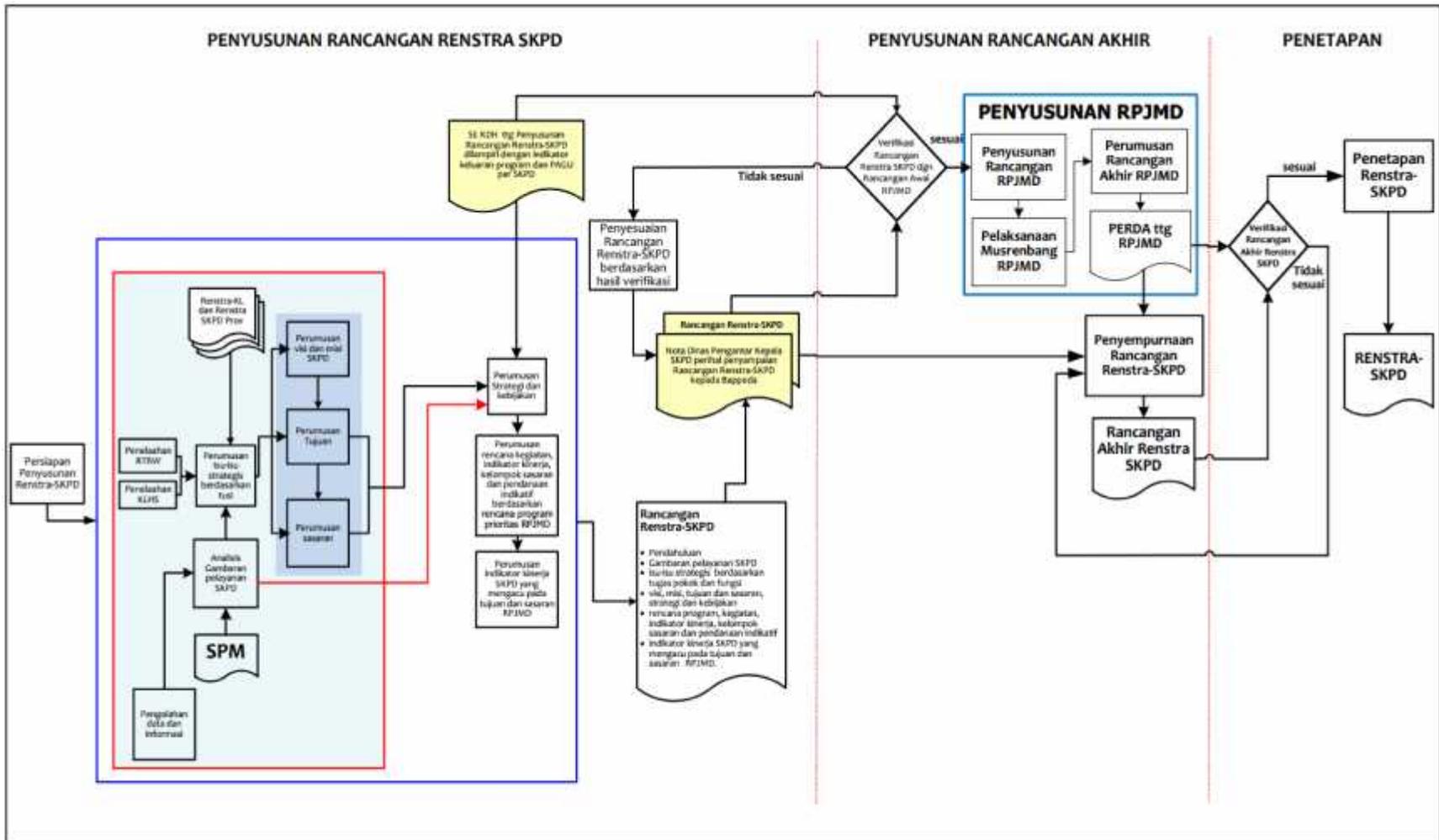
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Seiring dengan telah disusunnya RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, maka Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat perlu menyelaraskan dokumen lima tahunan Dinas Pangan yaitu Renstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Renstra ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, sehingga Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pangan diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra Dinas Pangan yang meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala Dinas Pangan tentang pembentukan tim penyusun Renstra Dinas Pangan, orientasi mengenai Renstra Dinas Pangan, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Dinas Pangan dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pangan, penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pangan dan penetapan Renstra Dinas Pangan.

Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat periode 2016 – 2021 menyajikan agenda utama Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk mengantisipasi masalah dan kendala berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2010 – 2015 yang diperkirakan akan timbul pada periode 5 (lima) tahun kedepan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran yang akan dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Gambar 1. Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pangan



Sebagai dokumen perencanaan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 disusun dengan berpedoman pada ; (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan IPTEK, (4) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (5) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (6) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025; (7) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan (8) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 disusun sebagai keberlanjutan dari Renstra periode 2010 – 2015. Pencapaian produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian strategik pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan Sumber Daya Aparatur, penyempurnaan manajemen selama periode 2010 – 2015 merupakan modal bagi perencanaan program pembangunan daerah tahun 2016 – 2021.

Berkaitan dengan hirarki organisasi, Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025, juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2017 tanggal 5 juni 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

Di sisi lain, guna mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan dan berkaitan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu unit kerja eselon I pada Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang ketahanan pangan, bersama-sama instansi terkait lainnya dalam memantapkan ketahanan pangan terutama dalam meningkatkan percepatan diversifikasi pangan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat, maka Renstra Badan Ketahanan Kementerian Pertanian juga telah disusun untuk periode 2015 – 2019 yang tentu saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui koordinasi antara Dinas Pangan di tingkat pusat dan daerah.

Untuk tercapainya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat juga perlu menetapkan tujuan, arah dan sasaran yang ingin dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi pencapaiannya melalui suatu strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan kedalam Renstra, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-undang No. 7 tahun 1996, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 pasal 13 tentang Ketahanan Pangan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden RI no 22 tahun 2009, tentang kebijakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. KEPPRES Nomor 132 tahun 2001 tentang "Dewan Ketahanan Pangan".
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Permentan No. 43 tahun 2009 tentang Percepatan Penganeekaragaman Berbasis Sumberdaya Lokal.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang "Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 3 tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan.
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 31 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal.

25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 66 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja UPT Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat.
26. Peraturan Menteri Pertanian No: 11/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015 – 2019.
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
28. Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat No: 520/474/II/Pangan-SB/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan landasan formal tentang arah dan kebijakan strategi selama lima tahun mendatang. Landasan formal ini akan menjadi pijakan legal dan implementasi program kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat selama periode tersebut. Penyusunan renstra juga dimaksudkan agar terdapat kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan antar sektor dan antar periode. Selain itu, penyusunan renstra juga dijadikan sebagai ukuran pertanggungjawaban kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam rentang periode 2016-2021.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- b. Memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016-2021

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan
 Memuat latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra serta Sistematika Penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pangan.
 Bab ini memuat Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Pangan, Kinerja Pelayanan Dinas Pangan serta Tantangan

dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan.

- BAB III. Isu-Isu Strategis
Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- BAB IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Memuat visi dan misi Dinas Pangan, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan serta strategi dan kebijakan.
- BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
Memuat program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan.
- BAB VI. Indikator Kinerja Dinas Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
Bab ini memuat keterkaitan indikator kinerja Dinas Pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN

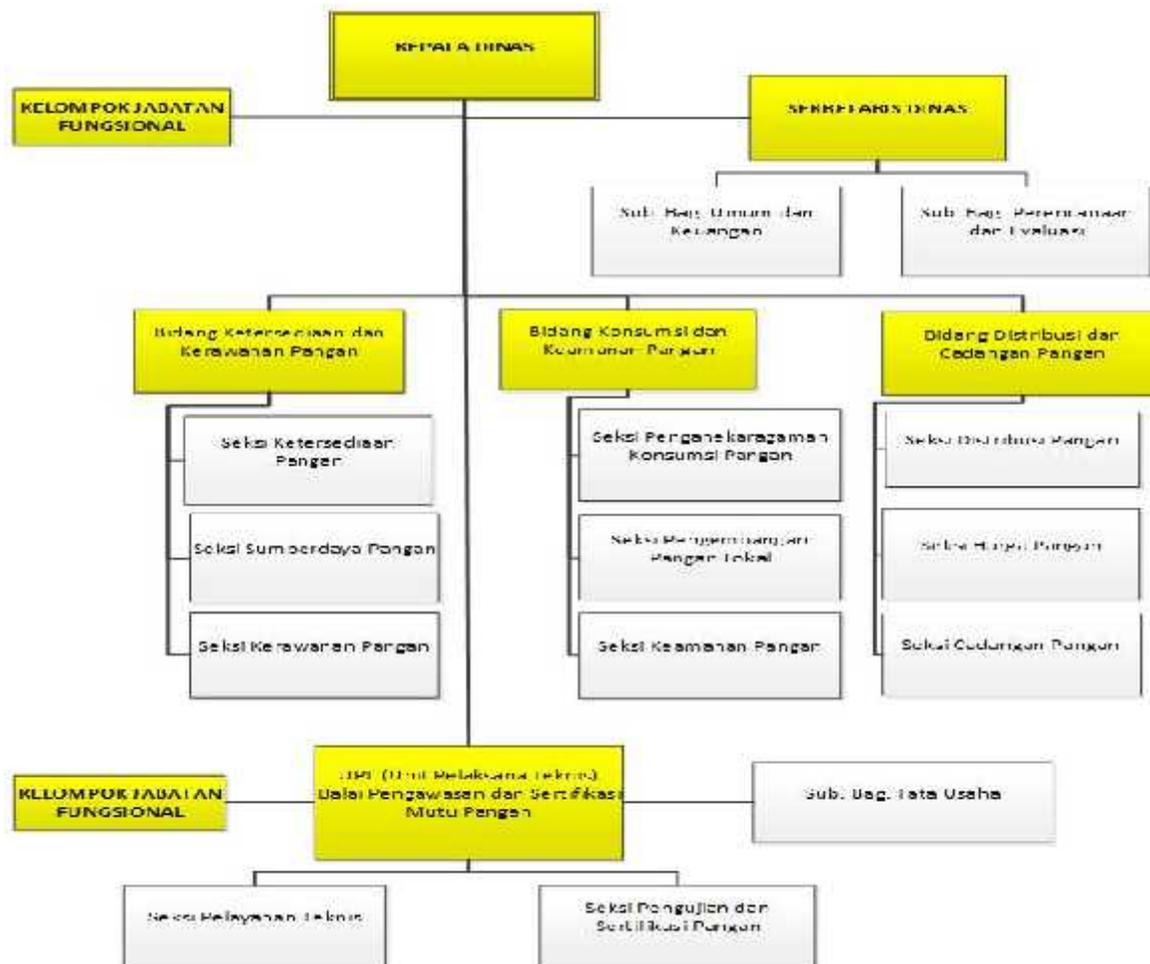
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi

Dinas Pangan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah urusan pangan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pangan Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2017 tanggal 5 juni 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2. Struktur Organisasi
Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat



Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan program, evaluasi dan pelaporan, urusan rumah tangga Dinas, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- Menyusun program kerja dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja urusan Dinas Pangan;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- Pengkoordinasian kegiatan ketatausahaan untuk memfasilitasi kelancaran tugas urusan Dinas Pangan;
- Pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategis;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi ;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

- c. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :

- Penyiapan pelaksanaan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan distribusi dan cadangan pangan;
- Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- Penyiapan pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan bidang distribusi dan cadangan pangan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang distribusi dan cadangan pangan;
- penyiapan pelaksanaan koordinasi operasional dibidang distribusi dan cadangan pangan;
- Koordinasi, monitoring, evaluasi, informasi dan promosi terhadap distribusi dan cadangan pangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Disribusi Pangan
 - b. Seksi Harga Pangan
 - c. Seksi Cadangan Pangan
- d. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- Penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- Penyiapan pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- penyiapan pelaksanaan koordinasi operasional dibidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- Koordinasi, monitoring, evaluasi, informasi dan promosi terhadap Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan Pangan
 - b. Seksi Sumberdaya Pangan
 - c. Seksi Kerawanan Pangan
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- Penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Konsumsi dan keamanan pangan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi dan keamanan pangan;
- Penyiapan pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- penyiapan pelaksanaan koordinasi operasional dibidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- Koordinasi, monitoring, evaluasi, informasi dan promosi terhadap Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - b. Seksi Pengembangan Pangan Lokal
 - c. Seksi Keamanan Pangan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Pangan (UPTD-BPSMP)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 66 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, dan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat No. 521/1601/BKP/2010, tanggal 29 Juni 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Esselon III dan IV dilingkungan UPTD-BPSMP Provinsi Sumatera Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Balai.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Pelayanan Teknis
- d. Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi.

UPTD-BPSMP mempunyai tugas 1). Melaksanakan pengawasan mutu bahan pangan segar baik yang produksi daerah maupun bahan pangan impor, 2). Melaksanakan sertifikasi mutu bahan pangan segar.

Sedangkan fungsi UPTD-BPSMP adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Teknis Operasional Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan.
- b. Pengkajian dan Analisa Teknis Operasional Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan.
- c. Pengujian dan persiapan teknologi pengawasan dan sertifikasi mutu pangan dilapangan.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan keamanan pangan segar.
- e. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidangan Pengawasan dan sertifikasi mutu pangan
- f. Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan pengawasan dan sertifikasi mutu pangan.

g. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.

2.2. Sumberdaya Dinas Pangan

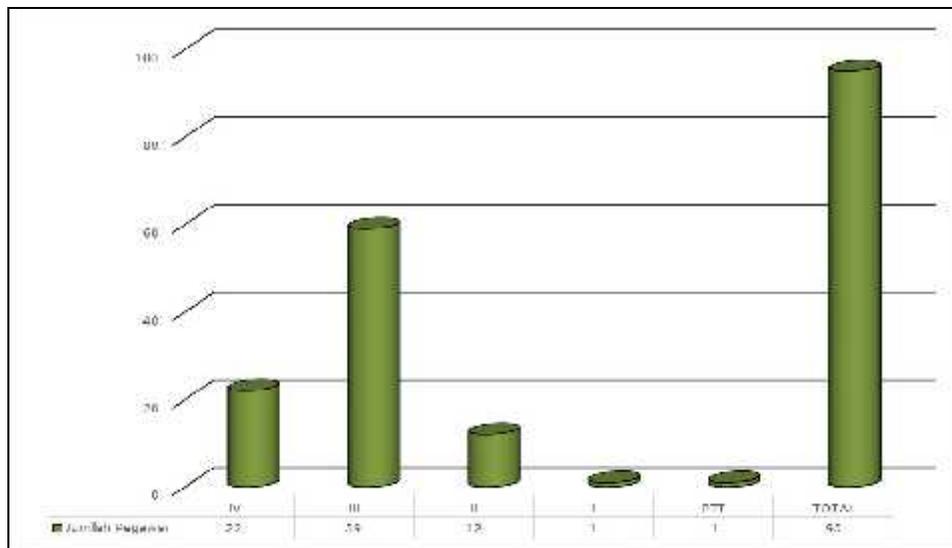
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi, terdapat jabatan struktural, yaitu :

- 1 jabatan Kepala Badan , Esselon II/a
- 1 jabatan Sekretaris dan 3 Jabatan Kepala Bidang, Esselon III/a
- 1 jabatan Kepala UPTB Esselon III/a
- 11 jabatan Kepala Sub Bidang / Kasubag, Esselon IV/a
- 3 jabatan Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian, Esselon IV/a (UPTB)

Dari sisi sumber daya kepegawaian, Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat kondisi pada tahun 2016 ini berjumlah sebanyak 95 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 83 orang, 10 orang pegawai fungsional, 1 orang Calon fungsional dan 1 orang honorer.

Pada grafik berikut dapat dilihat kekuatan pegawai di Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ditinjau dari berbagai aspek.

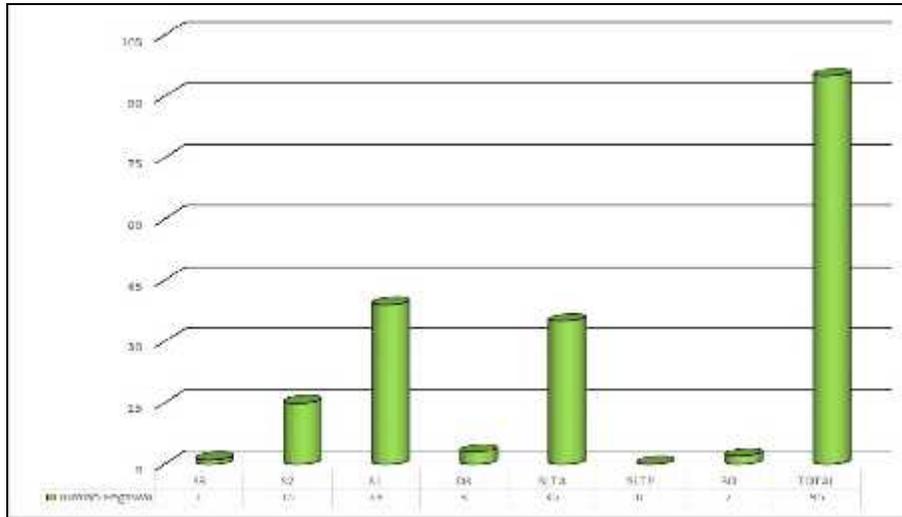
Grafik 2.2.1.
Kekuatan Pegawai di Dinas Pangan
Berdasarkan Golongan (Tahun 2016)



Sumber : Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pangan Sumbar

Berdasarkan grafik diatas, diketahui pegawai di Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sebagian besar adalah Gol. III sebanyak 59 orang (62,11%), Gol. IV sebanyak 24 orang (23,16%), Gol. II sebanyak 12 orang (12,63%), Gol. I sebanyak 1 orang (1,05%) dan PTT sebanyak 1 orang (1,05%).

Grafik 2.2.2.
Kekuatan Pegawai di Dinas Pangan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal (Tahun 2016)



Sumber : Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pangan Sumbar

Dari grafik diatas terlihat bahwa sebanyak 1 orang (1,05%) pegawai Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S3), sebanyak 15 orang (15,79%) pegawai berlatar belakang pendidikan sarjana (S2), dan sebanyak 39 orang (41,05%) pegawai memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1). Dengan demikian pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 57,89%. Selebihnya sekitar 3,16% adalah Sarjana Muda dan sebesar 38,95% adalah non sarjana.

Sedangkan dari sisi aset, jumlah aset Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang digunakan sampai dengan kondisi Desember 2016 tercatat sebesar Rp. 28.141.119.998,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Rincian Aset Tetap Dinas Pangan

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai Perubahan
				Persil	Jumlah	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	01		GOLONGAN TANAH			18.800.000.000,00
		01	TANAH	3	18.800	18.800.000.000,00
2	02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			4.872.766.500,00
		03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	-	30	1.846.203.150,00
		06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	-	614	2.989.281.350,00
		07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	-	6	37.282.000,00
3	03		GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			4.458.173.248,00
		11	BANGUNAN GEDUNG	3	420	4.458.173.248,00
4	05		GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA			10.180.250,00
		17	BUKU PERPUSTAKAAN	-	110	10.180.250,00
TOTAL HARGA						28.141.119.998,00
DIBULATKAN						28.141.119.998

Sementara itu, aset yang tidak berwujud kondisi tahun 2016 adalah sebesar Rp. 24.800.000,- yaitu berupa pembuatan website.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan

Melaksanakan pembangunan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab pemerintah (pusat dan daerah), bersama-sama dengan masyarakat. Lembaga koordinasi fungsional Dewan Ketahanan Pangan yang telah dibentuk pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat berfungsi memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat, agar memiliki kemampuan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan ditingkat wilayah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Bab IV disebutkan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan wajib meliputi yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal 12 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 18 urusan pemerintahan termasuk didalamnya bidang pangan, dan dengan demikian tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis di bidang ketahanan pangan perlu ditingkatkan guna terwujudnya pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan dari tahun 2010 – 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Dipertahankannya ketersediaan energi penduduk sebesar 2.200 KiloKalori/kapita/hari dan ketersediaan protein sebesar 57 gram/kapita/hari. Dari hasil analisis terhadap indikator kinerja dinas pangan, ketersediaan energi bagi penduduk sebesar 2.200 Kkal/kapita/hari telah terpenuhi dengan rata-rata capaian setiap tahun terhadap ketersediaan energi sebesar 4.321 Kkal/kapita/hari, begitu juga terhadap ketersediaan protein bagi penduduk telah dipenuhi dengan rata-rata ketersediaan energi protein sebesar 111 gram/kapita/hari. Dengan demikian dilihat dari ketersediaan energi dan ketersediaan protein penduduk Sumatera Barat telah dapat dipenuhi.
2. Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi, sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan cadangan pangan pemerintah provinsi sebesar 200 ton. Dari hasil analisis kinerja ketahanan pangan, menunjukkan bahwa penyediaan cadangan pangan pemerintah yang diamanatkan sebesar 200 ton yang dimulai sejak tahun 2010 telah terpenuhi dimana sampai dengan tahun 2015 telah terealisasi cadangan pangan sebesar 303 ton.
3. Persentase penanganan daerah rawan pangan, berdasarkan standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan persentase penanganan daerah rawan pangan

sebesar 60 %, di Sumatera Barat berdasarkan FSVA terdapat 6 kabupaten rawan pangan, dengan demikian harus dapat diatasi sebanyak 4 kabupaten dalam penanganan rawan pangan. Selama tahun 2010 – 2015 rata-rata penanganan daerah rawan pangan sebesar 36 %, tidak tercapainya target tersebut dikarenakan pada 6 kabupaten tersebut tidak seluruhnya mengalami bencana.

4. Persentase ketersediaan informasi pasokan dan harga pangan. Dari hasil analisis menunjukkan penyediaan informasi telah terealisasi sebesar 100 % dan penyediaan data informasi tersebut secara berkesinambungan.
5. Stabilisasi Harga Bahan Pangan Pokok di tingkat Produsen (CV 5). Dari hasil analisis kinerja ketahanan pangan terlihat bahwa koefisien variasi (CV) terhadap bahan pangan pokok ditingkat produsen selama tahun 2011 – 2015 berada dibawah 5, demikian tercipta stabilisasi harga di daerah.
6. Angka konsumsi energi dan protein penduduk Sumatera Barat, Dari hasil analisis terhadap indikator kinerja dinas pangan, konsumsi energi bagi penduduk sebesar 2.000 Kkal/kapita/hari telah terpenuhi dengan capaian setiap tahun dengan rata-rata konsumsi energi sebesar 2.043 Kkal/kapita/hari, begitu jugaterhadap konsumsi protein bagi penduduk telah dipenuhi dengan rata-rata konsumsi protein sebesar 60 gram/kapita/hari. Dengan demikian dilihat dari konsumsi terhadap energi dan protein penduduk Sumatera Barat telah dapat dipenuhi.
7. Skor pola pangan harapan (PPH). Dari hasil analisis kinerja terhadap indikator ini terlihat rata-rata PPH terealisasi sebesar 81 %, ini menggambarkan bahwa pola pangan masyarakat Sumatera Barat masih jauh dibawah SPM yaitu 90 %, dan dengan demikian masih perlu ditingkatkan agar tercipta pola pangan yang beragam, bergizi dan seimbang.
8. Persentase Penanganan Keamanan Pangan Segar, dari hasil pelaksanaan ketahanan pangan terlihat bahwa rata-rata persentase penanganan keamanan pangan segar tercapai sebesar 80 %, hal ini menunjukkan pembinaan keamanan pangan segar terhadap peredaran pangan segar hasil pertanian yang beredar telah terpenuhi sesuai dengan amanat SPM Ketahanan pangan.

Untuk lebih jelasnya pencapaian pelayanan Dinas Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 2.3.1.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Pelayanan Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Dipertahankannya Ketersediaan :																					
	a. Energi (Kkal/Kap/hari)		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	4.450	4.269	4.342	5.799	3.533	3.533	202,27	194,05	197,36	241,63	147,21	147,21
	b. Protein (Gram/Kap/Hari)		57	57	57	80	82	63	63	63	110,51	109,72	132,28	134,41	89,57	89,57	193,88	137,15	161,32	213,35	142,17	142,17
2	Tersedianya cadangan pangan pemerintah (ton)	200	200	200	-	30	54	21	30	30	30	54	20,8	30	118	50	-	180,00	38,52	144,23	393,33	166,67
3	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	60	60	60	-	60	60	60	60	60	16,67	16,67	16,67	66,67	50	50	-	27,78	27,78	111,12	83,33	83,33
4	Persentase Ketersediaan informasi :																					
	a. Pasokan Pangan (%)	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	b. Harga Pangan (%)	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Stabilisasi Harga Bahan Pangan Pokok di tingkat Produsen (CV≤5)		CV≤5	CV≤5	-	CV≤5	CV≤5	CV≤5	CV≤5	CV≤5	CV≤5	CV≤5	CV≤5	CV≤5	CV≤5	CV≤5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Angka Konsumsi *) :																					
	a. Energi (Kkal/Kap/hari)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2061,5	1936,1	2023,0	2088,0	2098,0	2050,0	103,08	96,81	101,15	104,40	104,90	102,50
	b. Protein (Gram/Kap/Hari)		52	52	52	52	52	52	52	52	63,3	63,1	60,8	56,1	57,4	57,2	121,73	121,35	116,92	107,88	110,38	110,00
7	Skor Pola Pangan Harapan (%)		85	85	-	80	82	76	77	78	80,1	75,8	77,5	84,4	83,7	84,7	-	94,75	94,51	111,05	108,70	108,59
8	Persentase Penanganan Keamanan Pangan Segar (%)	80	80	80	-	80	80	80	80	80	0	86,25	81,82	86,67	72,5	74	-	107,81	102,28	108,34	90,63	92,50

Untuk rasionalisasi anggaran dan pertumbuhan anggaran dengan realisasi anggaran pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 4.662.166.990,- dengan rasio rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 14,54 %, sedangkan rasio rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 25,56 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 6.592.312.300,- dengan rasio rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 108,43 %, sedangkan rasio rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 122,98 %. Tingginya pertumbuhan anggaran ini disebabkan pada tahun 2015 dianggarkan pembangunan UPTB-BPSMP melalui dana DAK.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 212.275.000,- dengan rasio rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 10,12 %, sedangkan rasio rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 14,74 %.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 145.930.000,- dengan rasio rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar - 47,44 %, sedangkan rasio rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -57,94 %. Rendahnya pertumbuhan dan realisasi anggaran ini disebabkan kurangnya undangan-undangan pelatihan di tingkat pusat.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 1.657.590.000,- dengan rasio rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 20,29 %, sedangkan rasio rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 20,51 %.
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 22.307.101.300,- dengan rasio rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 20,49 %, sedangkan rasio rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 25,52 %.

7. Program Diversifikasi Pangan, total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 3.364.840.400,- dengan rasio rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 59,71 %, sedangkan rasio rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 60,87 %. Tingginya pertumbuhan anggaran ini disebabkan pada tahun 2014 pada kegiatan Pemanfaatan Pekarangan dalam Pengembangan Pangan (P-KRPL) dana untuk bantuan ke pemerintah daerah (bansos) dialokasikan pada Dinas Pangan.
8. Program Program Terpadu Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil, program ini hanya dilaksanakan selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2011 – 2012, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.344.000.400,- untuk selanjutnya program tersebut tidak ada, dan kegiatan yang terkait dialokasikan pada program ketahanan pangan dan dprogram diversifikasi pangan.

Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 2.3.2.

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Langsung	6.030.361.000	6.057.596.600	10.044.839.510	9.550.797.000	9.820.585.880		4.706.865.644	5.538.023.811	9.476.315.833	9.306.905.102	9.534.202.676		78,05	91,42	94,34	97,45	97,08		16,05	22,36
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2.903.290.000	3.170.254.000	7.058.580.700	5.199.065.000	3.975.911.600		2.444.932.150	2.884.961.850	6.703.862.049	5.099.953.043	3.856.404.406		84,21	91,00	94,97	98,09	96,99		20,49	25,52
Pemantauan Produksi dan Ketersediaan Pangan	80.000.000	80.000.000	100.000.000	95.331.000	87.900.000		75.543.300	76.739.600	83.997.363	92.250.450	86.284.600		94,43	95,92	84,00	96,77	98,16		3,13	3,60
Analisa Ketersediaan Pangan Berdasarkan NBM	65.000.000	63.000.000	87.500.000	154.096.000	152.695.600		58.918.900	58.211.800	86.688.675	149.178.300	145.520.000		90,64	92,40	99,07	96,81	95,30		27,75	29,34
Apresiasi Penyusunan NBM	54.000.000						45.608.400						84,46						0,00	0,00
Penumbuhan Cadangan Pangan Pemerintah & Provinsi	420.000.000	180.000.000	311.524.800	1.074.123.000	511.101.300		406.521.200	172.545.000	305.283.100	1.060.321.120	508.669.400		96,79	95,86	98,00	98,72	99,52		52,08	53,67
Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat	70.000.000	82.000.000	121.287.000	144.710.000	111.962.400		58.801.500	73.311.800	118.388.500	141.147.500	108.811.000		84,00	89,40	97,61	97,54	97,19		15,43	20,62
Penumbuhan dan pembinaan DMP	157.000.000	110.000.000	160.740.000	121.290.000	125.844.000		146.419.700	98.997.700	159.525.000	120.397.100	122.864.298		93,26	90,00	99,24	99,26	97,63		-1,15	1,57
Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	150.000.000	90.000.000	193.800.000	97.290.000	94.658.000		140.466.800	87.289.500	191.096.500	96.225.800	92.803.500		93,64	96,99	98,61	98,91	98,04		5,71	6,97
Pengembangan kelembagaan Kemitraan Distribusi Pangan dan Kerjasama Distribusi Pangan Regional (Propinsi Tetangga)	110.000.000						90.355.000						82,14						0,00	0,00
Pembinaan dan Monev Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat		200.000.000	293.254.000					168.350.300	283.078.400					84,18	96,53				46,63	68,15
Koordinasi Pemantauan Harga dan Pengembangan JIH Wilayah	48.654.000	80.000.000	100.000.000	100.000.000	109.864.000		45.700.000	71.724.700	99.623.400	99.058.000	109.361.000		93,93	89,66	99,62	99,06	99,54		24,82	26,42
Apresiasi Distribusi dan Harga Pangan			60.903.000						57.733.900						94,80				0,00	0,00
Pemantauan Distribusi Pangan Antar Wilayah Melalui JTO		130.000.000						119.888.100						92,22					0,00	0,00
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)		80.000.000		736.000.000	148.670.000			71.299.500		730.635.000	146.697.900			89,12		99,27	98,67		-39,90	-39,96
Pemantauan Distribusi dan Akses Pangan	175.000.000		199.533.000	98.920.000	92.570.200		68.781.600		173.498.981	98.365.900	92.316.000		39,30		86,95	99,44	99,73		-18,95	-16,49
Sosialisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar		90.000.000						87.359.450						97,07					0,00	0,00
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar		105.000.000	200.000.000	147.600.000	145.737.000			97.586.800	186.231.900	144.070.500	137.985.700			92,94	93,12	97,61	94,68		21,00	21,32
Surveillance dan Pengawasan Keamanan Pangan Produk Bersertifikat Prima 3			137.000.000	143.500.000	154.580.000				127.011.300	140.804.800	142.599.000				92,71	98,12	92,25		6,23	6,07

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	(7)	1	2	3	4	5	(13)	1	2	3	4	5	(19)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	70.000.000	90.000.000					59.911.850	84.984.300					85,59	94,43					28,57	41,85
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Program Ketahanan Pangan	100.000.000	145.000.000	164.700.000	159.956.000	166.102.200		77.074.900	130.069.800	152.965.900	158.142.450	164.479.200		77,07	89,70	92,88	98,87	99,02		14,89	23,44
Gerakan Hari Pangan Sedunia (HPS) dan Pameran Ketahanan Pangan	100.000.000	285.800.000	2.943.879.000	260.756.000	287.645.000		98.728.400	253.369.050	2.833.106.200	255.190.400	271.740.500		98,73	88,65	96,24	97,87	94,47		258,75	272,57
Apresiasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		50.200.000						45.056.300						89,75					0,00	0,00
Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, Kabupaten dan Kota	120.000.000	105.000.000	760.738.000	160.000.000	107.157.000		68.989.000	87.519.000	688.263.400	148.133.473	103.861.500		57,49	83,35	90,47	92,58	96,92		125,00	151,23
Penumbuhan dan pengembangan kelompok tunda jual	75.000.000	145.000.000					57.614.700	130.338.700					76,82	89,89					93,33	126,22
Penilaian Kelembagaan Ketahanan Pangan	100.000.000	90.000.000	181.400.000	150.000.000	144.469.200		97.759.000	88.151.500	164.669.780	144.740.100	141.001.300		97,76	97,95	90,78	96,49	97,60		17,64	15,57
Apresiasi Petugas/pengurus Lumbung Pangan	50.000.000	73.754.000					46.645.000	65.885.900					93,29	89,33					47,51	41,25
Pilot Project Pengembangan Rice Milling Unit (RMU) pada Gapoktan	200.000.000	190.000.000					169.884.100	180.179.500					84,94	94,83					-5,00	6,06
Perluasan Pasar Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	50.000.000	130.000.000		150.000.000	146.538.600		20.630.000	112.384.500		148.609.100	144.510.400		41,26	86,45		99,07	98,62		78,85	221,00
Penyusunan Database Ketahanan Pangan	100.000.000	125.000.000	207.600.000	169.000.000	143.048.400		76.432.200	115.581.300	198.653.225	164.590.150	138.714.008		76,43	92,47	95,69	97,39	96,97		14,28	22,56
Akreditasi/verifikasi Lembaga Sertifikasi Pangan Segar (UPTB)	65.000.000						42.009.800						64,63						0,00	0,00
Sosialisasi dan Apresiasi Lembaga Sertifikasi Pangan Segar (UPTB)	30.000.000						29.039.700						96,80						0,00	0,00
Pengambilan Sampel, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan (UPTB)	70.000.000						63.188.200						90,27						0,00	0,00
Koordinasi Akses Pangan Wilayah Sumbar	40.000.000						38.261.600						95,65						0,00	0,00
Koordinasi dalam Rangka Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Pangan Segar	60.000.000						46.240.200						77,07						0,00	0,00
Peningkatan SDM Petugas dan Operasional Tim Terpadu Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar yang Beredar di Masyarakat (UPTB)	88.636.000						75.768.800						85,48						0,00	0,00
Sosialisasi dan In House Training Petugas dalam Rangka Peningkatan Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Segar	80.000.000						74.747.300						93,43						0,00	0,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan			
	1	2	3	4	5	(7)	1	2	3	4	5	(13)	1	2	3	4	5	(19)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Penas Tari ke XII - Kaltim	50.000.000						48.418.500						96,84						0,00	0,00
Koordinasi Penyuluhan Ketahanan Pangan	75.000.000						73.282.500						97,71						0,00	0,00
Dukungan Pengembangan Ketahanan Pangan pada Kawasan Sentra Produksi Agropolitan oleh BKP / Pokja Ketahanan Pangan	50.000.000						43.190.000						86,38						0,00	0,00
Workshop Lembaga Keuangan Desa dan Tim Pangan Desa		105.000.000						100.750.700						95,95					0,00	0,00
Apresiasi Pendampingan Ketahanan Pangan Prov. Sumatera Barat		120.000.000						99.495.000						82,91					0,00	0,00
Verifikasi pelaku usaha dalam rangka sertifikasi prima 3 atau prima 2		60.000.000						58.819.450						98,03					0,00	0,00
Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)		45.500.000		77.500.000	78.573.000			40.999.500		74.691.100	70.805.300			90,11		96,38	90,11	1,38	-5,20	
Promosi Rendang Tingkat Nasional		120.000.000						108.073.100						90,06					0,00	0,00
Pelatihan dan Evaluasi Petugas dan Pengurus Lumbung			84.607.900						79.251.100						93,67				0,00	0,00
Pelatihan TPD dan LKPD (DMP 2012 dan 2013, 2 angkatan)			129.300.000						121.901.300						94,28				0,00	0,00
Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Beredar di Masyarakat			148.600.000	125.500.000	197.465.000				139.184.000	122.859.000	191.808.300				93,66	97,90	97,14	20,90	22,20	
Pemasyarakatan Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Segar Menuju Sertifikat Prima			150.000.000	150.000.000	227.756.000				140.630.625	148.288.500	207.414.200				93,75	98,86	91,07	25,92	22,66	
Pelatihan Pendamping dan Petugas Kab/Kota			67.600.000						62.342.500						92,22				0,00	0,00
Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (SD/MTs) Hasil Usaha Rumah Tangga			254.614.000	194.875.000	221.055.100				250.737.000	193.052.900	217.675.500				98,48	99,06	98,47	-5,01	-5,13	
Pelatihan sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi				147.750.000	155.758.400					142.957.400	151.043.000					96,76	96,97	5,42	5,66	
Pengembangan Kawasan Agrowisata Sumatera Barat				241.993.000	72.013.000					232.607.000	71.863.000					96,12	99,79	-70,24	-69,11	
Survey Khusus Arus Bahan Pangan Prov. Sumbar Tahun 2013 dengan BPS				200.000.000						199.053.000						99,53			0,00	0,00
Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)				98.875.000						94.584.000						95,66			0,00	0,00
Parade Pangan Nusantara Tingkat Nasional					292.748.200						287.575.800						98,23		0,00	0,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan			
	1	2	3	4	5	(7)	1	2	3	4	5	(13)	1	2	3	4	5	(19)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Program Diversifikasi Pangan	240.000.000	545.000.000	980.715.000	1.940.332.000	658.793.400		227.631.400	513.299.300	885.655.430	1.878.078.700	627.402.300		94,85	94,18	90,31	96,79	95,24		59,71	60,87
Pengembangan	50.000.000						49.036.600						98,07						0,00	0,00
Penganekaragaman Konsumsi Pangan																				
Lomba Cipta Menu Konsumsi Pangan 3B Tingkat Provinsi	50.000.000	100.000.000		116.121.000	93.898.000		48.964.400	84.625.900		109.865.700	78.526.200		97,93	84,63		94,61	83,63		40,43	22,15
Pemanfaatan Pekarangan dalam Pengembangan Pangan (P-KRPL)	60.000.000	180.000.000	500.107.000	1.175.723.000	157.822.600		56.005.000	166.116.400	438.657.280	1.154.814.900	156.236.900		93,34	92,29	87,71	98,22	99,00		106,59	109,37
Kampanye Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Usia Dini	35.000.000	90.000.000					31.920.000	88.147.500					91,20	97,94					157,14	176,15
Pemantauan Keamanan Pangan Olahan Hasil Usaha Rumah Tangga		100.000.000						99.649.500						99,65					0,00	0,00
Koordinasi Penyuluhan Ketahanan Pangan		75.000.000						74.760.000						99,68					0,00	0,00
Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani			150.000.000						135.358.250						90,24				0,00	0,00
Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu			176.880.000	251.882.000	107.847.000				163.672.000	244.997.400	101.839.300				92,53	97,27	94,43		-7,39	-4,37
Pembinaan Makanan Khas Daerah			153.728.000						147.967.900						96,25				0,00	0,00
Pengembangan Komoditas Cadangan Pangan (Non Beras Non Terigu)				203.469.000	28.080.800					192.645.700	25.716.800					94,68	91,58		-86,20	-86,65
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	45.000.000			132.141.000	121.370.000		41.705.400			119.170.000	118.429.000		92,68			90,18	97,58		-4,08	-0,31
Pertemuan evaluasi KRPL 2014				60.996.000						56.585.000						92,77			0,00	0,00
Analisis Model Pengolahan Pangan Lokal					149.775.000						146.654.100								97,92	0,00
Program Terpadu Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil	1.040.000.000	304.000.000					726.281.400	283.725.100					69,83	93,33					-70,77	-60,93
Penumbuhan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Beras dan Jagung	106.070.000						61.198.200						57,70						0,00	0,00
Promosi Pangan Lokal pada Daerah Wisata	68.930.000						50.163.600						72,77						0,00	0,00
Penumbuhan dan Pendampingan/Pembinaan Kelembagaan Lumbung Pangan	65.000.000						45.742.000						70,37						0,00	0,00
Model Pengolahan Industri Kentang	500.000.000						372.112.600						74,42						0,00	0,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	(7)	1	2	3	4	5	(13)	1	2	3	4	5	(19)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Pengembangan Bisnis Pangan Lokal Melalui Usaha Tepung-Tepungan	150.000.000	178.000.000					146.424.000	173.531.000					97,62	97,49					18,67	18,51
Peningkatan Kapasitas Teknologi Usaha Pengolahan Pangan Lokal Masyarakat		126.000.000						110.194.100						87,46					0,00	0,00
Koordinasi Pengawasan, Pembinaan dan Pemantauan LDPM	150.000.000						50.641.000						33,76						0,00	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian				90.464.000					88.140.600							97,43			0,00	0,00
Program Fasilitas Purna Tugas PNS		127.500.000						127.500.000						100,00					0,00	0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	665.746.000	750.486.600	979.237.510	1.144.377.000	1.122.319.880		460.373.894	639.314.061	886.598.182	1.109.581.111	1.104.610.820		69,15	85,19	90,54	96,96	98,42	14,54	25,56	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	866.369.000	872.000.000	541.756.300	665.300.000	3.646.887.000		575.909.000	826.186.500	528.557.000	632.788.348	3.548.473.950		66,47	94,75	97,56	95,11	97,30	108,43	121,98	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	43.400.000	43.400.000	36.750.000	35.700.000	53.025.000		37.060.000	37.060.000	36.225.000	34.155.000	51.975.000		85,39	85,39	98,57	95,67	98,02	10,12	14,74	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	50.000.000	30.000.000		45.434.000	20.496.000		26.441.800	13.421.000		44.769.200	14.934.800		52,88	44,74		98,54	72,87	-47,44	-57,94	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	221.556.000	214.956.000	447.800.000	430.125.000	343.153.000		208.236.000	212.556.000	435.418.172	419.439.100	330.401.400		93,99	98,88	97,23	97,52	96,28	20,29	20,51	

Selama lima tahun terakhir, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya-upaya peningkatan ketahanan pangan melalui beberapa kegiatan strategis baik dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta analisis-analisis dalam rangka menghasilkan rumusan-rumusan dan kebijakan peningkatan ketahanan pangan baik dalam bentuk himbauan, edaran, keputusan dan peraturan gubernur terutama dalam hal sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi/lembaga/yayasan yang terkait.

Pembangunan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub sistem ketahanan pangan, yaitu ; 1) Sub Sistem Ketersediaan Pangan, 2) Sub Sistem Distribusi Pangan, dan 3) Sub Sistem Konsumsi Pangan. Seluruh kegiatan pembangunan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mendukung ketiga sub sistem tersebut.

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan secara fisik di suatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya. Sub sistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Dilihat dari produksi bahan pangan di Sumatera Barat, Produksi Komoditi Pangan Pokok, Strategis dan Unggul Lokal di Sumatera Barat selama Tahun 2012 – 2016 terjadi peningkatan di beberapa komoditi pangan. Berikut dapat dipaparkan perkembangan produksi perjenis komoditi pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2016 seperti tabel 2.3.3 berikut :

Tabel 2.3.3. Perkembangan Produksi Komoditi Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 s/d 2016

No	Komoditi	Produksi (ton) 2012	Produksi (ton) 2013	Produksi (ton) 2014	Produksi (ton) 2015	Produksi (ton) 2016 (ARAM II)	Pertumbuhan (%)
1	Gabah/Beras	2.368.390	2.430.384	2.519.020	2.550.609	2.606.640	2,43
2	Jagung	495.497	547.147	605.352	602.549	714.820	9,81
3	Kedelai	1.106	732	911	353	86	(36,56)
4	Ubi Kayu	213.647	218.830	217.962	208.386	180.013	(3,99)
5	Ubi Jalar	124.881	134.453	159.865	160.922	132.470	2,39
6	Kacang Tanah	9.597	9.093	7.410	5.964	5.342	(13,43)
7	Kacang Hijau	1.074	753	559	419	364	(23,46)
8	Sayur-sayuran	483.024	574.019	531.133	589.404	509.599	2,20
9	Buah-buahan	477.497	468.061	492.581	517.848	507.924	1,62
10	Daging	52.982	59.879	42.777	44.170	44.772	(2,73)
11	Telur	69.640	75.285	74.603	75.126	75.642	2,15
12	Susu	1.801	2.207	2.220	1.299	1.363	(3,36)
13	Ikan	337.012	460.680	488.062	501.519	578.364	15,18
Sumber : Data dari NBM Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat,2016							

2.3.1. Ketersediaan Energi dan Protein

Ketersediaan energi dan protein di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2012 - 2016 telah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi bahkan berada diatas angka ketersediaan minimal untuk dikonsumsi masyarakat. Target ketersediaan energi minimal untuk dikonsumsi masyarakat adalah sebesar 2.400 kkal/kap/hari.

Untuk melihat tingkat ketersediaan energi untuk dikonsumsi masyarakat Sumatera Barat tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada tabel 2.3.4 berikut :

Tabel : 2.3.4
Ketersediaan Energi Untuk Dikonsumsi Penduduk
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2016

No	Komoditi	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)				
		2012	2013	2014	2015	2016*)
1	2	3	4	5	6	7
I	PANGAN NABATI	4.079	5.536	3.407	3.295	3.783
1	Padi-Padian	3.120	3.638	2.678	2.350	2.973
2	Makanan Berpati	188	180	19	37	37
3	Gula	24	103	90	106	108
4	Buah Biji Berminyak	64	54	200	198	197
5	Buah-Buahan	147	103	59	62	58
6	Sayuran	80	68	51	68	63
7	Minyak/Lemak	456	1.391	310	475	346
II	PANGAN HEWANI	263	262	126	243	237
8	Daging	48	50	49	74	73
9	Telur	54	47	32	48	34
10	Susu	12	3	3	3	3
11	Ikan	149	162	41	118	126
	JUMLAH	4.342	5.799	3.533	3.538	4.020
<i>Ket</i>	: *) Angka Ramalan II, jumlah penduduk 5.259.528 jiwa					
Sumber	: Data dari NBM BKP Provinsi Sumatera Barat.					

Dari tabel di atas terlihat bahwa ketersediaan energi untuk dikonsumsi penduduk Sumatera Barat mengalami peningkatan hingga tahun 2013. Namun pada 2014, terjadi penurunan sebesar 2.266 kkal/kap/hari. Penurunan ini terjadi karena adanya perubahan metode dalam penghitungan.

Begitu juga untuk ketersediaan protein untuk dikonsumsi penduduk Sumatera Barat dari tahun 2012 - 2016 terlihat cukup stabil dengan tingkat ketersediaan protein minimal sebesar 63 gram/kap/hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3.5 berikut.

No	Komoditi	Ketersediaan Protein (Gram/ Kap/ Hari)				
		2012	2013	2014	2015	2016*)
1	2	3	4	5	6	7
I	PANGAN NABATI	82,31	95,93	74,81	76,08	81,78
1	Padi-Padian	72,41	87,54	62,70	64,14	69,99
2	Makanan Berpati	1,32	1,37	0,12	0,15	0,23
3	Gula	0,01	0,00	0,01	0,01	0,13
4	Buah Biji Berminyak	1,92	1,73	7,89	7,63	7
5	Buah-Buahan	2,31	1,66	1,09	1,07	0,93
6	Sayuran	4,05	3,59	2,98	3,06	3,46
7	Minyak/Lemak	0,29	0,05	0,03	0,03	0,03
II	PANGAN HEWANI	37,01	38,47	14,76	16,02	29,75
8	Daging	3,82	3,99	3,89	3,97	5,38
9	Telur	4,21	3,70	2,47	2,49	2,64
10	Susu	0,65	0,18	0,17	0,17	0,18
11	Ikan	28,33	30,61	8,22	9,39	21,55
	Jumlah	119,32	134,41	89,57	92,10	111,53
<i>Ket</i>	: *) Angka Ramalan II, jumlah penduduk 5.259.528 jiwa					
Sumber : Data dari NBM BKP Provinsi Sumatera Barat						

Dari tabel 2.3.5 terlihat bahwa ketersediaan protein untuk dikonsumsi penduduk Sumatera Barat masih jauh berada di atas angka yang ditetapkan dalam Susenas yaitu sebesar 63 gram/kap/hari. Dengan demikian penduduk Sumatera Barat tidak akan kekurangan dalam rangka konsumsi energi dan protein.

2.3.2. Konsumsi Energi dan Protein

Konsumsi bahan pangan yang ideal adalah 2.000 kkal/kap/hari dengan skor pola pangan harapan (PPH) adalah 100, dan pencapaian ini direncanakan pada tahun 2020. Konsumsi bahan pangan ideal yang ingin dicapai di tahun 2020 perjenis komoditi dapat dilihat pada tabel 2.3.6 berikut :

Tabel : 2.3.6
Target Konsumsi Pangan dan PPH s/d Tahun 2020

No	Kelompok Pangan	Target Konsumsi Pangan s/d 2020 (Kkal/kap/hr)	Skor PPH
1	Padi-padian	1000	25,00
2	Umbi-umbian	120	2,50
3	Pangan Hewani	240	24,00
4	Minyak & Lemak	200	5,00
5	Buah/Biji Berminyak	60	1,00
6	Kacang-kacangan	100	10,00
7	Gula	100	2,50
8	Sayur dan Buah	120	30,00
9	Lain-Lain	60	-
	Total	2.000	100,00

Sedangkan realisasi pola konsumsi energi dan protein masyarakat Sumatera Barat dari tahun 2012 s/d 2015 beserta PPHnya dapat dilihat pada tabel 2.3.7 berikut :

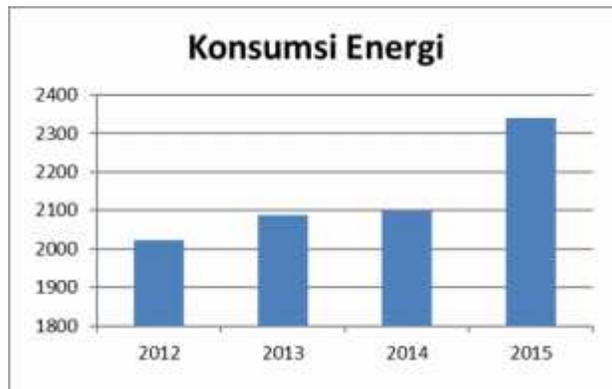
Tabel 2.3.7

Realisasi Konsumsi Pangan dan Skor PPH Penduduk Sumatera Barat Tahun 2012 s/d 2015

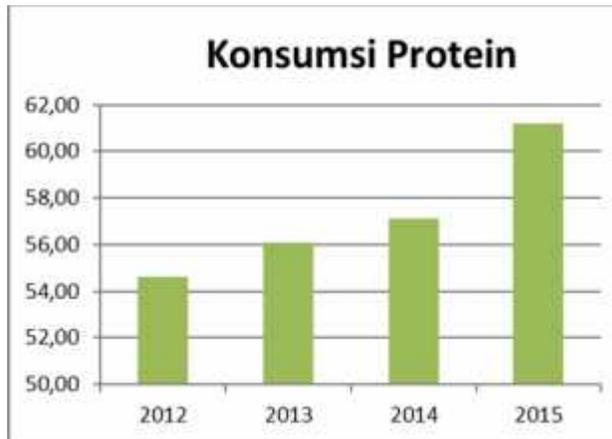
No	Kelompok Pangan	Realisasi Konsumsi Energi (Kkal / Kap / hr)				Realisasi Konsumsi Protein (Gram / Kap / hr)			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1	Padi - Padian	1237,0	1204,0	1216,0	1379,0	28,1	27,5	27,8	30,5
2	Umbi - Umbian	39,0	32,0	30,0	42,0	0,5	0,5	0,5	0,6
3	Pangan Hewani	177,0	173,0	176,0	201,0	17,5	17,0	17,7	18,7
4	Minyak & Lemak	261,0	288,0	284,0	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Buah/ Biji Berminyak	90,0	105,0	117,0	127,0	0,8	1,0	1,1	1,2
6	Kacang - Kacangan	32,0	42,0	42,0	49,0	3,1	4,3	4,4	5,2
7	Gula	70,0	93,0	88,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sayur dan Buah	91,0	115,0	111,0	98,0	3,3	4,1	4,1	3,5
9	Lain - lain	27,0	35,0	32,0	35,0	1,3	1,7	1,5	1,5
	Total	2023,0	2088,0	2098,0	2340,0	54,6	56,1	57,1	61,2
	% AKE	101,2	104,4	104,9	117,0	-	-	-	-
	% AKP	-	-	-	-	105,1	108,0	109,9	117,8
	PPH	77,5	84,4	83,7	83,8				
Sumber:	Susenas 2009, 2010, (2011-2013 triwulan I); BPS diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP								

Dari tabel 2.3.7 tersebut terlihat bahwa realisasi konsumsi energi dan protein mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 konsumsi energi mengalami peningkatan sebesar 65 Kkal/Kap/Hr. Pada tahun 2014, meningkat kembali sebesar 10 Kkal/Kap/Hr. Serta pada tahun 2015 mengalami peningkatan signifikan sebesar 242 Kkal/Kap/Hr. Begitu juga dengan konsumsi protein dimana tahun 2013 konsumsi protein mengalami penurunan sebesar 9 gram/kap/hr dan naik lagi

sebesar 1 gram/kap/hr di tahun 2014. Grafik perkembangan konsumsi energi dan protein penduduk Sumatera Barat tahun 2012 s/d 2015 sebagai berikut :



Grafik 2.3.1 : Realisasi Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hr) Masyarakat Sumatera Barat Tahun 2012 – 2015



Grafik 2.3.2 : Realisasi Protein (Gram/Kap/Hr) Masyarakat Sumatera Barat Tahun 2012 – 2015

Adapun kelompok bahan pangan yang perlu diturunkan tingkat konsumsinya berdasarkan konsumsi ideal adalah sebagai berikut ; padi-padian, minyak dan lemak serta buah biji berminyak. Sedangkan kelompok bahan pangan yang perlu dinaikkan tingkat konsumsinya adalah sebagai berikut; umbi-umbian, pangan hewani dan kacang-kacangan.

2.3.3. Cadangan Pangan

Cadangan pangan dimaksudkan untuk penanganan masalah rawan pangan, baik yang disebabkan oleh bencana alam ataupun daerah yang mengalami rawan pangan. Hal ini sesuai dengan Permentan No. 65 tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan provinsi dan kab/kota, dimana untuk provinsi harus menyediakan cadangan pangan minimal 200 ton beras, dan kab/kota minimal 100 ton beras pada tahun 2015. Hal ini juga

diperkuat dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini sampai tahun 2016, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat telah memiliki cadangan pangan sebanyak 324,8 Ton ekuivalen beras (terdiri dari tahun 2010 sebanyak 30 ton, tahun 2011 sebanyak 54 ton, tahun 2012 sebanyak 20,8 ton, tahun 2013 sebanyak 30 ton, tahun 2014 sebanyak 118 ton, tahun 2015 sebanyak 50 ton dan tahun 2016 sebanyak 22 ton). Cadangan pangan tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 92,8 ton, dengan demikian stok cadangan pangan provinsi sebanyak 232 ton beras.

Selama tahun 2011 s/d tahun 2016, dana cadangan pangan tersebut telah dimanfaatkan pada saat terjadi bencana, yaitu :

Tahun	Lokasi Penyerahan Bantuan	CPP Prov. Sumbar yang dikeluarkan
2011	Kec. Pangkalan Kab. 50 Kota (10 ton) dan Kec. Kinali Kab. Pasbar (5 ton)	15 ton
2012	Kec. Simpati Kab. Pasaman (5 ton) dan Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang (5 ton)	10 ton
2013	Kenagarian Koto Rajo dan Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kab. Pasaman	10 ton
2014	Kec. Sasak dan Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat	14 ton
2016	Kab. Solok Selatan (25 ton), Kab. Pasaman (10 ton) dan Kab. Pasaman Barat (8,8 ton)	43,8 ton
Jumlah		92,8 ton

2.3.4. Lumbung Pangan

Lumbung Pangan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok.

Strategi pengembangan lumbung pangan masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana lumbung yang telah disediakan oleh pemerintah, mengembangkan berbagai cara untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk pengelolaan lumbung yang sesuai dengan kultur budaya masyarakat setempat serta mengembangkan manajemen sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat secara terbuka dan transparan.

Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sosial (bansos) kepada kelompok. Tahun pertama adalah pembangunan gudang yang dibantu melalui dana DAK Kabupaten / Kota, tahap kedua adalah tahap pengembangan melalui pemberian dana bantuan sosial (melalui rekening kelompok) masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,-

perkelompok dan tahap ketiga adalah tahap mandiri yang merupakan hasil verifikasi terhadap kelompok tahap pengembangan dan diberi bantuan sosial sebesar Rp. 20.000.000,- lagi perkelompok. Jadi kelompok lumbung pangan yang sudah melalui tahap mandiri sudah menerima bantuan sosial masing-masing Rp. 40.000.000,- perkelompok.

Dari tahun 2012 s/d tahun 2015 melalui dana APBN, kelompok Lumbung Pangan yang telah melalui tahap mandiri adalah sebanyak 53 kelompok dengan total dana sebesar Rp.1.800.000.000,- yang tersebar di 11 kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk tahun 2015, lumbung pangan tahap mandiri dialokasikan untuk 16 kelompok tahap mandiri yang tersebar di 8 kabupaten/kota dan 44 kelompok tahap pengembangan yang tersebar di 8 Kabupaten di Sumatera Barat. Pada tahap mandiri, kegiatan tidak terealisasi pada 1 kelompok di Kabupaten Pasaman karena adanya permasalahan teknis. Untuk lebih jelasnya alokasi dana bantuan sosial kegiatan Lumbung Pangan tahap mandiri tahun 2012 - 2015 dan tahap pengembangan dapat dilihat pada tabel - tabel berikut ini :

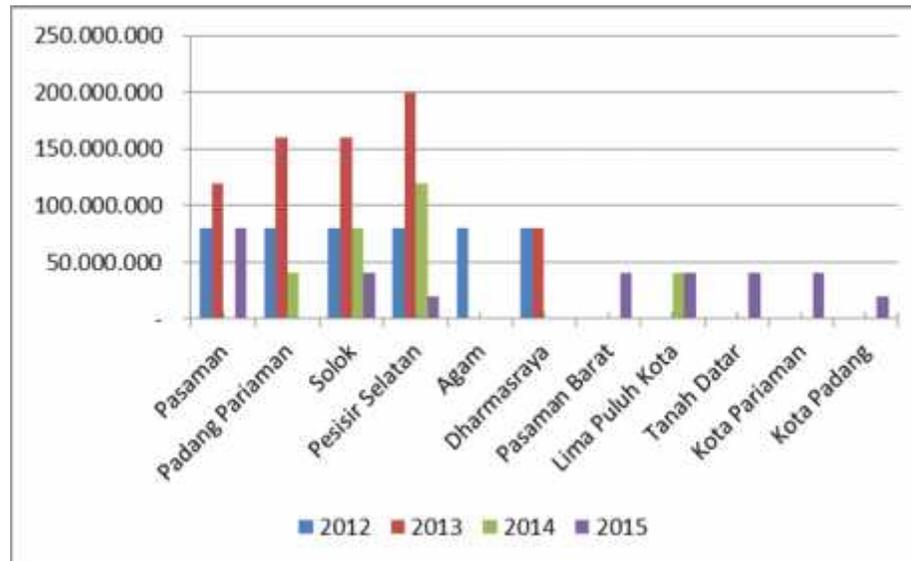
Tabel 2.3.8 :
Lokasi Penerima Dana Bansos Lumbung Pangan Tahap Mandiri
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2015

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Bansos (Rp)							
		2012		2013		2014		2015	
		Jumlah Kelompok	Dana Bansos	Jumlah Kelompok	Dana Bansos	Jumlah Kelompok	Dana Bansos	Jumlah Kelompok	Dana Bansos
1	Pasaman	2	80.000.000	3	120.000.000	-	-	4	80.000.000
2	Padang Pariaman	2	80.000.000	4	160.000.000	1	40.000.000	-	-
3	Solok	2	80.000.000	4	160.000.000	2	80.000.000	2	40.000.000
4	Pesisir Selatan	2	80.000.000	5	200.000.000	3	120.000.000	1	20.000.000
5	Agam	2	80.000.000	-	-	-	-	-	-
6	Dharmasraya	2	80.000.000	2	80.000.000	-	-	-	-
7	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	2	40.000.000
8	Lima Puluh Kota	-	-	-	-	1	40.000.000	2	40.000.000
9	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	2	40.000.000
10	Pariaman	-	-	-	-	-	-	2	40.000.000
11	Padang	-	-	-	-	-	-	1	20.000.000
Jumlah		12	480.000.000	18	720.000.000	7	280.000.000	16	320.000.000

Tabel 2.3.9
Lokasi Penerima Dana Bansos Lumbung Pangan Tahap Pengembangan
Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Bansos (Rp)					
		Tahap Pengembangan Tahun 2014			Tahap Pengembangan Tahun 2015		
		Jumlah Kelompok	Dana Bansos	Jumlah Kelompok	Dana Bansos	Jumlah Kelompok	Dana Bansos
1	Pasaman	5	Kelompok	100.000.000	3	Kelompok	60.000.000
2	Tanah Datar	2	Kelompok	40.000.000	5	Kelompok	100.000.000
3	Solok	2	Kelompok	40.000.000	8	Kelompok	160.000.000
4	Pesisir Selatan	1	Kelompok	20.000.000	8	Kelompok	160.000.000
5	Pasaman Barat	2	Kelompok	40.000.000	9	Kelompok	180.000.000
6	Lima Puluh Kota	2	Kelompok	40.000.000	4	Kelompok	80.000.000
7	Kota Padang	1	Kelompok	20.000.000	2	Kelompok	40.000.000
8	Kota Pariaman	2	Kelompok	40.000.000	5	Kelompok	100.000.000
Jumlah		17	Kelompok	340.000.000	44	Kelompok	880.000.000

Perkembangan alokasi dana bantuan sosial Lumbung Pangan Tahap Mandiri dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.3.3 : Perkembangan dana bantuan sosial Lumbung Pangan Tahap Mandiri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2015

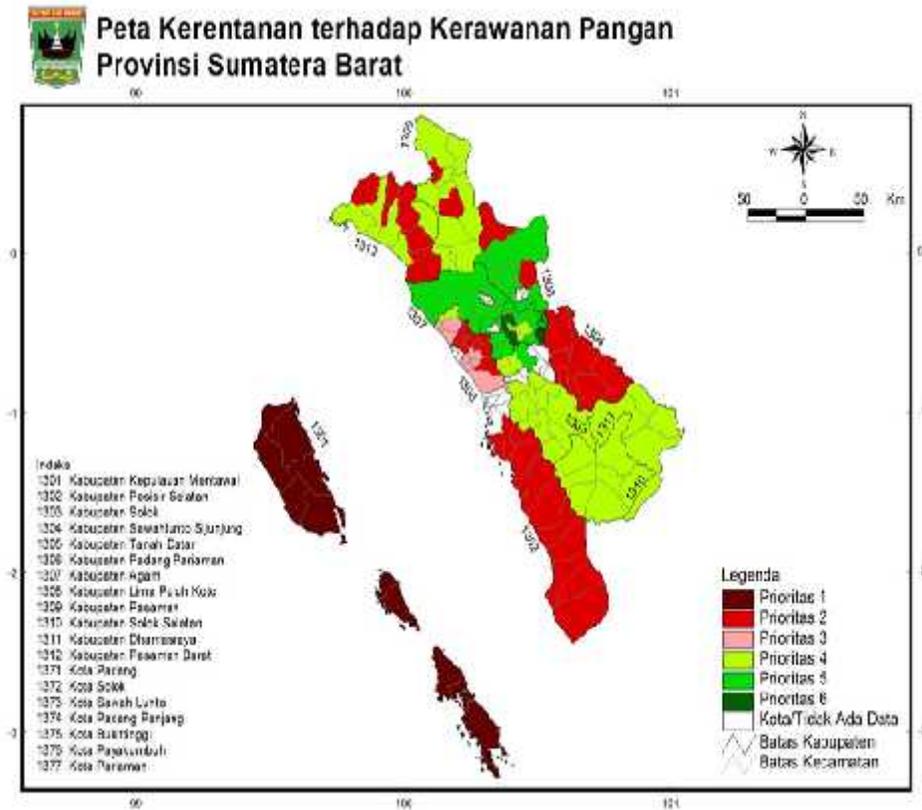
2.3.5. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)

Ketahanan pangan telah menjadi salah satu variabel strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan masih perlu mendapat perhatian. Pengelolaan program ketahanan pangan dan gizi yang efektif memerlukan informasi ketahanan pangan dan gizi yang akurat dan tertata dengan baik, karena melalui informasi itulah berbagai intervensi kebijakan bisa dilakukan untuk penanganan masalah pangan. Menyadari pentingnya informasi yang dapat menggambarkan kondisi ketahanan pangan di daerah, Dinas Pangan bersama World Food Programme (WFP) mengembangkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA). Atlas ini berfungsi untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan gizi. Dengan adanya atlas ini diharapkan program ketahanan pangan dan gizi bisa efektif sesuai dengan targeting ketahanan pangan dan gizi.

Pada tingkat provinsi, analisis dan pemetaan dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi. FSVA tingkat provinsi dibuat berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan: (i) ketersediaan pangan; (ii) akses terhadap pangan; dan (iii) pemanfaatan pangan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan disusun 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, hal ini disebabkan karena data dalam tiga tahun tersebut tidak berubah secara signifikan.

Berdasarkan peta FSVA yang telah disusun Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011, maka lokasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Sumatera Barat di Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3 : Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan Provinsi (FSVA) Sumatera Barat

Berdasarkan peta FSVA tersebut di atas, dapat dijabarkan lokasi daerah rawan pangan dengan resiko ringan, sedang dan berat (prioritas 1 s/d 3) sebagai berikut :

Tabel 2.3.10
Lokasi Penduduk dengan Resiko Ringan, Resiko Sedang dan Resiko Berat Terjadinya
Rawan Pangan Berdasarkan peta FSVA di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan		
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3
1	Kabupaten Mentawai	Pagai Utara/Selatan Sikakap Pagai Utara Sipora Sipora Utara Sipora Selatan Siberut Barat Daya Siberut Tengah Siberut Utara Siberut Barat		
2	Pasaman		Panti Rao	
3	Pesisir Selatan		Lunang Silaut Basa IV Balai Tapan Pancung Soal Linggo Sari Baganti Ranah Pesisir Lengayang Sutera Batang Kapas IV Jurai Bayang IV Nagari Bayang Koto XI Tarusan	
4	Pasaman Barat		Ranah Batahan Lembah Melintang Gunung Tuleh Pasaman Luhak Nan Duo Kinali	
5	Sijunjung		Kamang Baru Tanjung Gadang Sijunjung Lubuk Tarok IV Nagari Kupitan Koto Tujuh Sumpur Kudus	
6	Limapuluh Kota		Harau Kapur Sembilan	
7	Padang Pariaman		Lubuk Alung 2 x 11 Enam Lingkung 2 x 11 Kayu Tanam VII Koto Sungai Sarik Patamuan Padang Sago V Koto Kampung Dalam V Koto Timur	Batang Anai Sintuk Toboh Gadang Ulakan Tapakis Nan Sabaris VI Lingkung Sungai Limau Batang Gasan Sungai Geringging
Ket Merah prioritas 2				
Merah Tua Prioritas 1				
Merah Muda Prioritas 3				
Sumber : Data FSVA Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat				

Dengan adanya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) maupun SKPG diharapkan dapat meminimalisir kejadian rawan pangan baik rawan pangan kronis yang terjadi sepanjang waktu maupun rawan pangan transien yang terjadi secara mendadak di Indonesia, khususnya Sumatera Barat.

Akan tetapi, penanganan kerawanan pangan kronis dan transien yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara

optimal, karena: (1) belum adanya persepsi yang sama tentang kerawanan pangan; (2) sumberdaya dalam penanganan kerawanan pangan masih terbatas, dan (3) koordinasi dan sinkronisasi penanganan rawan pangan kurang optimal.

Salah satu kegiatan strategis Dinas Pangan dalam hal penanggulangan kerawanan pangan yaitu Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP). Sasaran dari kegiatan PDRP ini adalah masyarakat yang mengalami rawan pangan, sedangkan tujuan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah:

1. Mencegah terjadinya rawan pangan
2. Menanggulangi kejadian rawan pangan transien
3. Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat dalam mengatasi kejadian kerawanan pangan

Dalam rangka penanggulangan kejadian rawan pangan baik transien (sementara/mendadak) maupun kronis (lama/tetap), Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 melalui dana APBD Provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 43.000.000,-.

Pemanfaatan dana PDRP tersebut adalah untuk mengatasi ; kerawanan pangan akibat bencana alam, gagal panen, penduduk yang mengalami gizi buruk, Rumah Tangga Miskin (RTM), serta ibu hamil dan ibu menyusui yang diindikasikan kurang gizi.

Seluruh dana tersebut telah disalurkan sesuai dengan peruntukannya, dan selama tahun 2016 dialokasikan untuk 76 KK di 3 Kabupaten yang mengalami bencana. Bantuan yang diberikan berupa bahan pangan senilai Rp. 500.000,- per Kepala Keluarga. Untuk melihat realisasi pemanfaatan dana PDRP dari tahun 2012 s/d tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.3.11 berikut :

Tabel 2.3.11

Lokasi Penerima Dana Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2016								
No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Bansos (Rp)					Ket.
			Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Agam	Lubuk Basung	-	-	-	-	-	-
		Tanjung Raya	-	5.940.000	-	-	-	-
2	Pesisir Selatan	IV Nagari Bayang Utara	-	8.159.000	-	-	-	-
		Koto XI Tarusan	-	6.997.200	-	-	-	-
		Air Pura	-	-	12.347.300	-	-	-
		IV Jurai	-	-	-	28.000.000	-	-
3	Pasaman	IV Nagari Bayang Utara	-	-	-	7.600.000	-	-
		Bonjol dan Simpati	-	-	-	-	-	-
		Simpatidan Tigo Nagari	98.508.800	-	-	-	-	-
		Rao Utara	-	19.900.000	-	-	-	-
		Tigo Nagari	-	37.998.700	-	-	-	-
		Panti	-	-	-	-	13.000.000	
4	Kota Padang	Lubuk Kilangan, Pauh, KurANJI dan Nanggalo	49.518.000	-	-	-	-	-
5	Pasaman Barat	Sasak Ranah Pasisia	-	16.000.000	-	-	-	-
		Talamau	-	-	30.771.000	-	-	-
6	Tanah Datar	Batipuh Selatan	16.176.000	-	-	-	15.000.000	-
		Lintau Buo	-	-	-	-	-	-
7	Padang Pariaman	Lubuk Alung	23.392.000	-	-	-	10.000.000	-
8	Sijunjung	Tanjung Gadang	-	-	6.360.000	-	-	-
9	Kota Solok	Lb. Sikarah	-	-	-	20.000.000	-	-
		Lb. Sikarah	-	-	-	15.600.000	-	-
Jumlah			187.594.800	94.994.900	49.478.300	71.200.000	38.000.000	-

Dengan adanya kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan diharapkan dapat mengatasi permasalahan kejadian rawan pangan kronis maupun transien. Sehingga pencegahan kerawanan dapat dilakukan sedini mungkin dan penanggulangan apabila terjadi rawan pangan dapat segera diatasi.

2.3.6. Desa Mandiri Pangan (DMP)

Kegiatan ini merupakan pengembangan nagari rawan pangan yang mempunyai potensi sumber daya alam berupa penambahan modal untuk pengembangan usaha masyarakat miskin melalui pengembangan Lembaga Keuangan Desa (LKD), sehingga terjadi peningkatan pendapatan yang berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu :

-) Tahun I, merupakan Tahap Persiapan
-) Tahun II, merupakan Tahap Penumbuhan
-) Tahun III, merupakan Tahap Pengembangan
-) Tahun IV, merupakan tahap kemandirian

Kegiatan DMP ini diberikan dalam bentuk dana bantuan sosial/hibah kepada desa mandiri pangan, sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat miskin untuk usaha yang produktif. Dana ini disalurkan langsung dari rekening pemerintah ke dalam rekening kelompok setelah dilaksanakannya survey lokasi, pembentukan kelompok dan penyusunan rencana usaha kelompok (RUK).

Secara umum, dana yang disalurkan kepada kelompok-kelompok afinitas yang tergabung dalam desa mandiri pangan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat miskin untuk berbagai jenis usaha seperti pertanian, peternakan, perikanan, usaha rumah tangga dan lain sebagainya. Kegiatan desa mandiri pangan berupa bansos yang didanai oleh APBN maupun APBD tahun 2010 telah direalisasikan sebesar Rp. 2.680.000.000 untuk 26 desa yang tersebar di 16 Kabupaten/Kota. Sedangkan tahun 2011 telah direalisasikan sebesar Rp 1.340.000.000,- untuk 15 Desa pada 12 Kabupaten/Kota. Selanjutnya 2012 telah direalisasikan sebesar Rp 1.900.000.000,- untuk 19 Desa yang beralokasi pada 15 kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya lokasi dan jumlah dana bantuan sosial untuk kegiatan Desa mandiri pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.12
Alokasi Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 - 2012

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
		Nama Desa	Jumlah Dana	Nama Desa	Jumlah Dana	Nama Desa	Jumlah Dana
A	Dana APBN						
1	Lima Puluh Kota	Sungai Naniang	100.000.000	-	-	Pangkalan	100.000.000
						Durian Tinggi	100.000.000
2	Agam	Mudiak	100.000.000	-	-	Siguhuang	100.000.000
		Jor. Balai Badak	100.000.000	-	-	-	-
3	Solok	Rawang Abu	100.000.000	-	-	Sungai Durian	100.000.000
						Kubang Nan Duo	100.000.000
4	Sijunjung	Koto Tengah	100.000.000	-	-	Padang Lalang	100.000.000
5	Pesisir Selatan	Sei. Bungin	100.000.000	-	-	Sungai Nyalo	100.000.000
6	Solok Selatan	Sei. Lambai	100.000.000	Pakan Rabaa	100.000.000	-	-
7	Pdg Pariaman	Gasan Gadang	100.000.000	Lareh Nan Panjang	100.000.000	Lubuak Laweh Jajaran	100.000.000
		Padang Alai	100.000.000	-	-	-	-
8	Dharmasraya	Pulai	100.000.000	Koto Salak	-	Kampung Baru	100.000.000
		Simalidu	100.000.000	-	-	-	-
9	Pasaman	Koto Rajo	100.000.000	Pdg. Gelugur	100.000.000	Musuhih	100.000.000
		Simpang Tonang	100.000.000	-	-	-	-
10	Tanah Datar	Gunuang Rajo	100.000.000	Balimbing	100.000.000	Nagari Supayang	100.000.000
		Pd. Laweh Malalo	100.000.000	-	-	-	-
11	Pasaman Barat	-	-	Sasak	100.000.000	Pasa Lamo	100.000.000
12	Ko. Payakumbuh	Kel. Balai Nan Tuo	100.000.000	Koto Panjang Dalam	100.000.000	Kelurahan Pasir	100.000.000
		Kel. V Kampung	100.000.000	-	-	-	-
13	Ko. Bukittinggi	Kel. Bukit Apit Puhun	100.000.000	Puhun Pintu Kabun	100.000.000	-	-
		Kel. Koto Selayan	100.000.000	-	-	-	-
14	Ko. Padang Panjang	Kel. Koto Panjang	100.000.000	Ganting	100.000.000	Kel. Kampung Manggis	100.000.000
15	Ko. Padang	Kel. Kuranji	100.000.000	Surau Gadang	100.000.000	Kel. Padang Sarai	100.000.000
		Kel. Balai Gadang	100.000.000	-	-	-	-
		Ke. Kurao Pagang	100.000.000	-	-	-	-
16	Ko. Solok	Kel. Laing	100.000.000	VI. Suku	100.000.000	Kel. Tanjung Paku	100.000.000
		Kel. Tanah Garam	100.000.000	-	-	-	-
17	Ko. Pariaman	Tungkal Selatan	100.000.000	Marunggi	100.000.000	Kel. Cubadak Aia	100.000.000
	Jumlah	26 Desa	2.600.000.000	11 Desa	1.100.000.000	17 Desa	1.700.000.000
B	Dana APBD						
1	Ko. Padang Panjang	Kel. Koto Katiak	80.000.000	-	-	-	-
2	Tanah Datar	-	-	Labuah	80.000.000	Nagari Parambahan	100.000.000
3	Pdg Pariaman	-	-	Campago	80.000.000	-	-
4	Pasaman Barat	-	-	Kajai	80.000.000	Nagari Parit	100.000.000
	Jumlah B	1 Desa	80.000.000	3 Desa	240.000.000	2 Desa	200.000.000
	Jumlah (A + B)	27 Desa	2.680.000.000	14 Desa	1.340.000.000	19 Desa	1.900.000.000

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah agar usaha masyarakat tersebut berkembang sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan pangannya dan pendapatannya juga meningkat. Selanjutnya pada tahun 2013 s/d 2015 kegiatan Desa Mandiri Pangan (DMP) secara nasional mengalami moratorium,

dengan demikian kegiatan bansos/hibah tidak ada lagi, namun hanya ada kegiatan pembinaan lanjutan terhadap kelompok-kelompok afinitas DMP yang telah ditumbuhkan pada tahun-tahun sebelumnya.

2.3.7. Kawasan Mandiri Pangan

Kawasan Mandiri Pangan adalah kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari kampung-kampung terpilih (3 s.d 5 kampung/desa), untuk menegakkan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri. Rancangan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di Papua-Papua Barat, kepulauan, dan perbatasan dilaksanakan selama 5 tahap (5 tahun), meliputi Tahap Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian, dan Strategi Keberlanjutan Kegiatan. Dalam tiga tahap pertama, pembinaan dan pendampingan dilaksanakan utamanya melalui kegiatan APBN, dua tahun terakhir diharapkan peran pemerintah daerah akan lebih dominan. Berdasarkan disain ini diharapkan adanya keberlanjutan dan kesinambungan program pengembangan dan manfaat dari implementasi kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan dengan pendekatan wilayah kecamatan, melalui (1) identifikasi permasalahan dan pemetaan potensi sumberdaya, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) penguatan kelembagaan untuk mendukung sistem ketahanan pangan di kawasan, dan (4) koordinasi untuk sinkronisasi dan integrasi program lintas sektor dan sub sektor.

Tahapan kegiatan Pengembangan kawasan mandiri Pangan dilaksanakan dengan beberapa tahap sebagai berikut :

- ✓ Tahun 1, Tahap Persiapan
Pemilihan lokasi dan penrima manfaat, Pengembangan baseline data, Penetapan Pendamping, Pembentukan Kelompok Afinitas, dan kelembagaan penunjang (LKD/LKK, TPD/FKK), Tim Asistensi Kab/Prop, Penetapan Kesepakatan kelompok dalam penggunaan dana bergulir, pelatihan-pelatihan teknis
- ✓ Tahun 2, Tahap Penumbuhan
Penyusunan dan implementasi RUK, dengan pendampingan dari fasilitator, Penguatan Kelembagaan Penunjang (LKD/LKK,TPD/FKK), Penguatan Koordinasi Lintas Sektor di Propinsi dan Kabupaten/Kota (infrastruktur dan kesehatan) → Penguatan Tim Asistensi, dan TPD
- ✓ Tahun 3, Tahap Pengembangan
Pengembangan pasar dan jaringan, serta penguatan tabungan masyarakat, pengembangan infrastruktur oleh desa (DAD), kabupaten atau provinsi yang difasilitasi oleh Tim Pangan Desa (TPD)/Forum Komunikasi Kawasan (FKK) dan/atau Tim Asistensi Kabupaten/Provinsi.
- ✓ Tahun 4 - 5, Tahap kemandirian
Intensitas pendampingan fasilitator mulai dikurangi

Untuk Provinsi Sumatera Barat, Kawasan Mandiri Pangan Tahun Pertama (Tahap Persiapan) dialokasikan pada 4 Kabupaten sebagai berikut:

Tabel.2.3.13 : Kawasan Mandiri Pangan Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa / Nagari	Keterangan
1	Sijunjung	Kecamatan Lubuk Tarok	Nagari Silongo, Nagari Kampung Dalam, Nagari Latang, Nagari Taratak Baru, Nagari Lubuk Tarok	Tahap Persiapan
2	Pesisir Selatan	Kecamatan Air Pura	Nagari Tluk Kualo Indera Pura, Nagari Lubuk Betung Indera Pura, Nagari Lalang Panjang Indera pura, Nagari Indera Pura Utara, Nagari Damar Lapan Batang Indera Pura	Tahap Persiapan
3	Pasaman	Bonjol	Nagari Ganggo Hilia, Nagari Ganggo Mudiak, Nagari Koto Kaciak, Nagari Limo Koto	Tahap Persiapan
4	Dharmasraya			Tidak Terealisasi

Pada tahun 2015, Kawasan ini semula direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat, kemudian direvisi ke Kabupaten Dharmasraya, tetapi juga tidak bisa dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan teknis.

2.3.8. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)

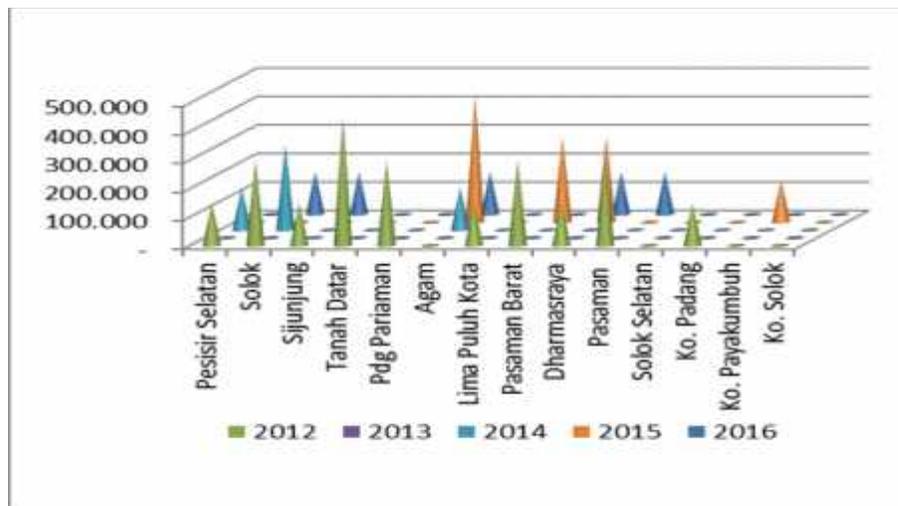
Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat adalah bagian kegiatan program peningkatan ketahanan pangan yang bertujuan meningkatkan kemampuan Gapoktan dan unit-unit usaha yang dikelolanya (distribusi/pemasaran dan cadangan pangan) dalam usaha memupuk cadangan pangan dan memupuk modal dari usahanya dan dari anggotanya yang tergabung dalam wadah Gapoktan serta mendukung kapasitas Gapoktan dalam mengelola distribusi hasil produksinya agar anggotanya dapat memperoleh harga yang optimal pada saat musim panen.

Kegiatan P-LDPM dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap mandiri. Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dimulai pada tahun 2009, sampai dengan tahun 2016 ini telah ditumbuhkan sebanyak 97 LDPM yang tersebar pada 14 kabupaten/kota, baik dari APBN maupun APBD Provinsi. Tahun 2009 telah ditumbuhkan LDPM sebanyak 41 Gapoktan, Tahun 2010 sebanyak 8 Gapoktan, Tahun 2011 sebanyak 15 Gapoktan, Tahun 2012 sebanyak 16 Gapoktan, sedangkan tahun 2013 penumbuhan LDPM mengalami moratorium. Tahun 2014 telah ditumbuhkan lagi sebanyak 4 Gapoktan, Tahun 2015 sebanyak 8 Gapoktan dan Tahun 2016 tumbuh sebanyak 5 Gapoktan. Untuk lebih jelasnya alokasi kegiatan LDPM pada tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada tabel 2.3.14 berikut :

Tabel. 2.3.14

		Alokasi Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2016																	
No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Gapoktan dan Jumlah Dana Penumbuhan dan Pengembangan LDPM Provinsi Sumatera Barat																	
		Tahun 2012				Tahun 2013				Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016	
		Penumbuhan Tahun 2012		Pengembangan Thn 2011		Penumbuhan Tahun 2013		Pengembangan Thn 2012		Penumbuhan Tahun 2014		Pengembangan Thn 2013		Penumbuhan Tahun 2015		Pengembangan Thn 2014		Penumbuhan Tahun 2016	
		Jlh Gapoktan	Dana (000.-)	Jlh Gapoktan	Dana (000.-)	Jlh Gapoktan	Dana (000.-)	Jlh Gapoktan	Dana (000.-)	Jlh Gapoktan	Dana (000.-)	Jlh Gapoktan	Dana (000.-)	Jlh Gapoktan	Dana (000.-)	Jlh Gapoktan	Dana (000.-)	Jlh Gapoktan	Dana (000.-)
1	Pesisir Selatan	1	150.000	1	75.000	-	-	-	-	1	150.000	-	-	-	-	-	-	-	
2	Solok	2	300.000	1	75.000	-	2	150.000	2	300.000	2	150.000	-	-	-	-	1	150.000	
3	Sijunjung	1	150.000	1	75.000	-	1	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000	
4	Tanah Datar	3	450.000	2	125.000	-	1	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pdg. Pariaman	2	300.000	2	150.000	-	2	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Agam	-	-	1	75.000	-	-	-	1	150.000	-	-	3	450.000	-	-	1	150.000	
7	Lima Puluh Kota	1	150.000	-	-	-	1	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pasaman Barat	2	300.000	1	50.000	-	-	-	-	-	-	-	2	300.000	2	50.000	-	-	
9	Dharmasraya	1	150.000	-	-	-	1	75.000	-	-	-	-	2	300.000	1	50.000	1	150.000	
10	Pasaman	2	300.000	-	-	-	1	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000	
11	Solok Selatan	-	-	1	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Ko. Padang	1	150.000	1	50.000	-	1	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Ko. Payakumbuh	-	-	1	75.000	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000	-	-	-	-	
14	Ko. Solok	-	-	1	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	16	2.400.000	13	900.000	-	10	750.000	4	600.000	2	150.000	8	1.200.000	3	100.000	5	750.000	

Pada tabel di atas terlihat hanya 2 dari 4 gapoktan tahap penumbuhan 2014 yang berlanjut ke tahap pengembangan. Hal ini dikarenakan terkendalanya persyaratan teknis. Gambaran perkembangan LDPM Provinsi Sumatera Barat Tahap Penumbuhan dapat dilihat pada grafik 2.3.4 sebagai berikut :



Grafik 2.3.4 : Perkembangan LDPM Tahap Penumbuhan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016

2.3.9. Informasi Harga dan Pasokan Pangan

Kondisi ketersediaan pangan sangat berkaitan dengan harga dan pasokan pangan dan merupakan faktor strategis yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan yang mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Terjadinya gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi harga pangan perlu segera ditindaklanjuti sehingga tidak menimbulkan keresahan dan gejolak sosial pada masyarakat.

Pengembangan Jaringan informasi harga pangan sangat diperlukan, sehingga informasi harga pangan cepat dan akurat dapat diakses/diterima oleh yang membutuhkan. Hal ini dimaksud agar dapat mengetahui kondisi harga diberbagai tempat. Situasi harga yang berbeda disetiap tempat akan memungkinkan yang berkepentingan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik.

Pengambilan data harga pasar dilakukan pada saat pasar/transaksi terjadi, situasi ramai (situasi disesuaikan dengan lokasi masing-masing daerah dengan 3 responden) yang dihimpun setiap minggu oleh petugas dari kabupaten / kota. Data harga rata-rata dikirim setiap minggunya ke Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat melalui Short Message System (SMS) ke Nomor 081374488386 atau melalui Faximile ke Nomor (0751) 7054505.

Persentase perkembangan harga rata-rata komoditi pangan tingkat produsen dan tingkat konsumen dapat dilihat pada tabel 2.3.15 berikut :

Tabel 2.3.15

PERSENTASE PERKEMBANGAN HARGA KOMODITI PANGAN POKOK DI TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN DI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 S/D 2015									
No	Bahan Pangan Pokok	% Harga Produsen				% Harga Konsumen			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1	Beras Kualitas I/Premium	5,08	8,87	1,00	5,34	1,39	8,73	1,00	4,62
2	Beras Kualitas II/Medium	6,71	8,46	1,00	6,06	2,29	8,25	1,00	5,46
3	Cabe Merah	59,66	14,79	11,00	33,94	31,96	11,70	10,00	32,97
4	Bawang Merah	163,71	43,45	-1,00	19,13	116,87	32,12	-1,00	17,41
5	Daging Sapi	42,68	14,60	1,00	1,83	17,30	10,26	2,00	2,09
6	Daging Ayam Bloiler	1,82	5,05	0,00	6,67	-0,58	4,09	-1,00	7,11
7	Telur ayam Ras	6,94	5,87	0,00	8,88	8,08	5,20	0,00	5,27
8	Ikan air Tawar	0,26	5,82	1,00	3,90	0,96	5,36	1,00	1,57
9	Gula Pasir	30,34	18,83	0,00	4,92	1,53	9,45	0,00	5,01
10	Minyak Goreng	16,11	18,07	1,00	3,72	-7,43	3,83	0,00	3,96

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

2.3.10. Toko Tani Indonesia (TTI)

Panjangnya rantai pasok komoditas pangan disinyalir sebagai faktor yang menyebabkan tidak efisiensinya tata niaga pangan. Hal ini diindikasikan oleh tidak seimbangannya perolehan marjin dari masing-masing pelaku pasar. Kondisi timpang ini telah berlangsung lama dan berkontribusi sangat nyata terhadap tingkat kesejahteraan petani. Disisi lain, panjangnya pelaku tata niaga pangan tersebut membuat konsumen sulit memperoleh harga wajar sehingga harus menerima harga akumulasi dari marjin keuntungan yang diperoleh dari pelaku rantai pasok.

Mencermati kondisi tata niaga pangan tersebut, Kementerian Pertanian cq Dinas Pangan menggulirkan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) sebagai terobosan baru guna memangkas rantai pasok. Oleh karena itu. Kegiatan ini membawa misi untuk melindungi produsen dari jatuhnya harga dan disisi lain, melindungi konsumen dari tingginya harga pangan sehingga tercipta tata niaga pangan yang berkeadilan.

Di Sumatera Barat pendirian toko tani, setiap gapoktan mendapat bantuan modal masing-masing Rp. 200.000.000,-. Di Sumatera Barat TTI telah

berdiri di didirikan 30 Toko Tani Indonesia di 13 Kabupaten/Kota, diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.3.16 berikut:

Tabel 2.3.16				
Rekap Toko Tani Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016				
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Gapoktan	Jumlah Toko Tani Indonesia	Dana Bantuan Pemerintah (Rp.)
1	Agam	1	2	200.000.000
2	Pesisir Selatan	1	2	200.000.000
3	Sijunjung	1	2	200.000.000
4	Pasaman Barat	1	2	200.000.000
5	Solok	1	2	200.000.000
6	Dharmasraya	1	2	200.000.000
7	Ko. Padang	2	4	400.000.000
8	Ko. Bukittinggi	1	2	200.000.000
9	Ko. Payakumbuh	1	2	200.000.000
10	Ko. Solok	1	2	200.000.000
11	Ko. Sawahlunto	1	2	200.000.000
12	Ko. Padang Panjang	1	2	200.000.000
13	Ko. Pariaman	1	2	200.000.000
TOTAL		14	28	2.800.000.000

2.3.11. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), merupakan gerakan dalam rangka memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor PPH pada tahun 2021 sebesar 87,0.

Gerakan P2KP merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan dan merupakan salah satu kunci sukses pembangunan pertanian di Indonesia. P2KP dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan utama yaitu: (a) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari; (b) Pengembangan Pangan Lokal; serta (c) Promosi dan Sosialisasi P2KP. Kegiatan P2KP telah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga saat ini dengan berbagai sasaran dan capaian yang terus berkembang. Kegiatan Utama P2KP adalah; Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, Pengembangan Usaha Pangan Lokal (Bisnis Pangan) berbasis Tepung-Tepungan dan Pengembangan P2KP bagi Siswa SD / MI.

Pada tahun 2013, optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilaksanakan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan target sasaran awal pada 5000 desa baru dan 1280 desa lanjutan tahun 2012; pada 497 kabupaten/kota di 33 propinsi. Untuk Provinsi Sumatera Barat melalui APBN kegiatan KRPL dilaksanakan pada 211 Desa pada 19 kabupaten/kota, dan

ditambah dengan 90 Desa pada 18 kabupaten kota melalui dana APBD. Pada Tahun 2015, dari hasil evaluasi Kemendagri yang tidak memperbolehkan pemberian Bansos menyebabkan kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya, yang bisa dilaksanakan hanya pembinaan dan money terhadap kelompok lama (2014 dan sebelumnya).

Kegiatan KRPL tahun 2015 dilaksanan di 114 desa di 16 kabupaten / kota melauai dana APBN dan ditambah 50 desa yang merupakan lanjutan pemberian bansos tahun 2014. Untuk lebih jelasnya lokasi KRPL Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 - 2015 dapat dilihat pada tabel 2.3.17 berikut :

Tabel 2.3.17
Alokasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2015

NO.	Kabupaten / Kota	Jumlah KRPL											
		2013				2014				2015			
		APBN	Anggaran	APBD	Anggaran	APBN	Anggaran	APBD	Anggaran	Bansos Lanjutan (2014)	Anggaran	Pendam pangan	Anggaran
1	Kab. Pasaman	12 klp	564.000.000	5 klp	100.000.000	8 klp	376.000.000	6 klp	60.000.000	- klp	-	- klp	-
2	Kab. Tanah Datar	10 klp	470.000.000	5 klp	100.000.000	6 klp	282.000.000	5 klp	50.000.000	6 klp	18.000.000	6 klp	90.000.000
3	Kab. Pasaman Barat	8 klp	376.000.000	5 klp	100.000.000	6 klp	282.000.000	4 klp	40.000.000	6 klp	18.000.000	6 klp	90.000.000
4	Kab. Lima Puluh Kota	14 klp	658.000.000	5 klp	100.000.000	0 klp	-	2 klp	20.000.000	- klp	-	12 klp	180.000.000
5	Kab. Agam	14 klp	658.000.000	6 klp	120.000.000	0 klp	-	6 klp	60.000.000	- klp	-	12 klp	180.000.000
6	Kab. Padang Pariaman	9 klp	423.000.000	6 klp	120.000.000	6 klp	282.000.000	2 klp	20.000.000	6 klp	18.000.000	6 klp	90.000.000
7	Kab. Pesisir Selatan	16 klp	752.000.000	5 klp	100.000.000	8 klp	376.000.000	5 klp	50.000.000	- klp	-	- klp	-
8	Kab. Sijunjung	16 klp	752.000.000	5 klp	100.000.000	8 klp	376.000.000	0 klp	-	- klp	-	- klp	-
9	Kab. Solok	18 klp	846.000.000	4 klp	80.000.000	6 klp	282.000.000	7 klp	70.000.000	6 klp	18.000.000	12 klp	180.000.000
10	Kab. Solok Selatan	12 klp	564.000.000	5 klp	100.000.000	0 klp	-	0 klp	-	- klp	-	12 klp	180.000.000
11	Kab. Dharmasraya	7 klp	329.000.000	6 klp	120.000.000	6 klp	282.000.000	0 klp	-	6 klp	18.000.000	6 klp	90.000.000
12	Kab. Kep. Mentawai	4 klp	188.000.000	0 klp	-	- klp	-	0 klp	-	- klp	-	6 klp	-
13	Kota Padang	10 klp	470.000.000	11 klp	220.000.000	4 klp	188.000.000	22 klp	220.000.000	4 klp	12.000.000	4 klp	60.000.000
14	Kota Sawahlunto	8 klp	376.000.000	4 klp	80.000.000	0 klp	-	2 klp	20.000.000	- klp	-	8 klp	120.000.000
15	Kota Padang Panjang	10 klp	470.000.000	3 klp	60.000.000	4 klp	188.000.000	5 klp	50.000.000	4 klp	12.000.000	4 klp	60.000.000
16	Kota Pariaman	10 klp	470.000.000	4 klp	80.000.000	4 klp	188.000.000	3 klp	30.000.000	4 klp	12.000.000	4 klp	60.000.000
17	Kota Bukittinggi	11 klp	517.000.000	3 klp	60.000.000	0 klp	-	0 klp	-	- klp	-	8 klp	120.000.000
18	Kota Payakumbuh	12 klp	564.000.000	3 klp	60.000.000	4 klp	188.000.000	5 klp	50.000.000	4 klp	12.000.000	4 klp	60.000.000
19	Kota Solok	10 klp	470.000.000	5 klp	100.000.000	4 klp	188.000.000	2 klp	20.000.000	4 klp	12.000.000	4 klp	60.000.000
J U M L A H		211 klp	9.917.000.000	90 klp	1.800.000.000	74 klp	3.478.000.000	76 klp	760.000.000	50 klp	150.000.000	114 klp	1.620.000.000

2.3.12. Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Tahun 2006 Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai instansi yang berwenang (otoritas kompetensi) dalam menangani pengawasan keamanan pangan segar dengan SK Gubernur No. 520-329-2006. Selanjutnya sebagai pemegang otoritas pengawasan keamanan pangan segar telah dilakukan kegiatan setiap tahunnya dalam bentuk koordinasi dengan aparat terkait Provinsi, Kabupaten/Kota, peningkatan SDM petugas dan

masyarakat tentang keamanan pangan. Identifikasi dan Sosialisasi dalam rangka mempersiapkan bahan pengawasan lebih lanjut oleh Tim Pengawasan Keamanan Pangan Segar Provinsi Sumatera Barat.

Tahun 2009 melalui Perda No. 3/2008 yang disempurnakan dengan Perda No. 7/2009 dan ditindaklanjuti dengan Pergub No. 66/2009, dimana menetapkan bahwa pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi mutu pangan segar di Sumatera Barat. Dengan berubahnya Badan Ketahanan Pangan menjadi Dinas Pangan, maka UPTB pun menjadi UPT pada Dinas Pangan.

Pangan segar yang beredar di pasar baik yang berasal dari Sumatera Barat maupun dari luar provinsi belum tentu terjamin dari cemaran residu bahan kimia (pestisida, formalin, dll). Guna mendeteksi dan mengendalikan jumlah / tingkat cemaran residu bahan kimia baik cemaran fisik dan biologi lainnya yang beredar di masyarakat perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan serta dengan melakukan uji laboratorium terhadap pangan segar tersebut.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat akan terawasi, dimana sampel pangan segar yang ada di tengah masyarakat (pasar dan swalayan) diuji di laboratorium sehingga dapat diketahui cemaran yang bisa mempengaruhi bahan pangan tersebut. Dengan demikian terjadi peningkatan ketersediaan pangan segar yang aman dan bermutu yang beredar di tengah masyarakat.

Pada Tahun 2014, telah diterbitkan sebanyak 30 sertifikat untuk komoditi Jeruk Siam sebanyak 20 sertifikat, komoditi wortel sebanyak 4 sertifikat, komoditi bawang daun sebanyak 2 sertifikat, komoditi cabe merah sebanyak 2 sertifikat, komoditi terung sebanyak 1 sertifikat dan komoditi kol bunga 1 sertifikat. Selain itu ada 4 sertifikat prima 3 yang diperpanjang untuk komoditi Jeruk Siam.

Pada tahun 2015 telah diterbitkan sebanyak 32 sertifikat diantaranya 21 sertifikat untuk komoditi jeruk siam, dan 10 sertifikat untuk komoditi pepaya dan 1 sertifikat untuk komoditi cabe. Pada tahun 2015 juga dilakukan peningkatan sertifikat prima 2 untuk komoditi jeruk siam sebanyak 3 sertifikat. Selain itu juga dianggarkan dengan dana APBN sebanyak 7 sertifikat prima 3 komoditi manggis.

Dengan diterbitkannya Sertifikat Prima 3 bagi pelaku usaha agribisnis ini maka akan dapat meningkatkan keamanan pangan segar (buah dan sayuran). Hal ini akan memberikan manfaat dalam penyediaan produk pangan segar yang aman untuk dikonsumsi sehingga dapat melindungi masyarakat dari bahan pangan yang membahayakan kesehatan. Selain itu juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas produk pangan segar yang dihasilkan petani/pelaku usaha dan memiliki daya saing di pasar global.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan

Dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Sumatera Barat, perlu dilakukan analisis situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan berdasarkan isu strategis dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan

kedepan sehingga ketahanan pangan masyarakat dapat terwujud dimasa mendatang.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Ketahanan Pangan di Sumatera Barat adalah :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
- b. Masih terdapatnya KK miskin pada desa tertentu diatas 30% yang harus mendapat penanganan daerah rawan pangan.
- c. Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor.
- d. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
- e. Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/padi dan terjadi pergeseran pola konsumsi kearah konsumsi berbahan baku terigu/gandum.
- f. Alih fungsi lahan, penambahan jumlah penduduk, anomali iklim adalah beberapa hal yang dapat mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan;
- g. Dalam hal distribusi, pasokan, harga dan akses pangan, Provinsi Sumatera Barat merupakan pensuplay bahan pangan bagi provinsi tetangga terutama Provinsi Riau, Jambi dan Bengkulu, sehingga menjadi ancaman bagi stabilisasi harga dan ketersediaan, serta alur tata niaga;
- h. Dalam hal keamanan pangan masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan;

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Sumatera Barat adalah :

- a. Dengan pertambahan jumlah penduduk Sumatera Barat merupakan pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi daerah.
- b. Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah surplus pangan, sehingga dapat mensuplay bahan pangan bagi provinsi tetangga terutama Provinsi Riau, Jambi dan Bengkulu.
- c. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.
- d. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.
- e. Ketersediaan sumber daya lahan dan air sebagai faktor utama produksi untuk menghasilkan pangan, belum dikelola secara optimal.
- f. Dalam hal distribusi, pasokan, harga dan akses pangan, Provinsi Sumatera Barat merupakan pensuplay bahan pangan untuk provinsi tetangga, sehingga berpeluang dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
- g. Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat memberikan peluang pada percepatan perubahan pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat. Hal ini merupakan momentum bagi pengembangan diverifikasi pangan;
- h. Pengembangan jejaring kerjasama dengan dunia usaha/perbankan dan masyarakat, merupakan peluang bagi pemantapan ketahanan pangan

BAB 3. ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan

Isu strategis yang kini sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, terjadi krisis pangan dan energi dunia, harga pangan dan energi meningkat, sehingga negara-negara yang semula menjadi pengekspor pangan cenderung menahan produknya dijadikan stok pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan nasional. Isu strategis nasional lainnya adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang bergantung pada beras.

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem yaitu : a) Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk; b) Distribusi pangan yang lancar dan merata; c) Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan. Untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang mantap, dalam pelaksanaan program harus memfokuskan pada lima fundamental penanganan pertanian yang mencakup: 1). Pembangunan/perbaikan infrastruktur perbenihan, riset dan sebagainya; 2). Penguatan kelembagaan petani melalui pertumbuhan dan penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani; 3). Perbaikan penyuluhan melalui penguatan kelembagaan penyuluhan dan tenaga penyuluh; 4). Perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan akses petani ke sistem pembiayaan; 5). Penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani.

Keterlibatan seluruh masyarakat untuk mengawal arah pembangunan daerah khususnya pembangunan ketahanan pangan agar berjalan dan terlaksana dengan baik akan terwujud apabila disusun perencanaan yang sinergis dan terintegrasi serta memperhatikan keberlanjutan proses perencanaan.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah kemandirian pangan masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.

Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut pertumbuhan penduduk, semakin terbatasnya sumber daya alam dan beralih fungsinya lahan pertanian, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin. Permintaan bahan pangan per kapita juga meningkat didorong oleh

meningkatnya pendapatan, kesadaran kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat.

Dengan melihat tantangan yang semakin berat pada 2016 - 2021, maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Aspek Ketersediaan Pangan	Ketersediaan bahan pangan pokok (beras) = 1.433.975 Ton	Ketersediaan data produksi	Internalisasi, edukasi, advokasi	Bencana Alam, Perubahan Iklim (mempengaruhi produksi, dan kerawanan pangan)	Semakin terbatasnya kapasitas produksi pangan daerah, serta belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi
	Penanganan daerah rawan pangan	Pendataan	Pemetaan daerah rawan pangan		
Aspek Konsumsi Pangan	Skor PPH =83,7	Widyakarya Nasional Pangan dan gizi (WNPG),	Sosialisasi, Promosi, pemantauan/pengawasan	Regulasi	Konsumsi dan keamanan Pangan Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah
	Keamanan Pangan = 75 %	SPM Bidang Ketahanan Pangan			
Aspek Distribusi Pangan	Stabilisasi harga bahan pangan pokok (beras) di tingkat konsumen ≤ 5 %	Operasi pasar murni	Pengumpulan data informasi pasar	Fluktuasi harga	Tidak stabilnya harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut ;

1) Aspek Ketersediaan

Semakin terbatasnya kapasitas produksi pangan daerah disebabkan beberapa kendala antara lain : (i) Berkurangnya lahan pertanian produktif karena alih fungsi lahan untuk perumahan dan peruntukan lainnya; (ii) Penyediaan sarana produksi (pupuk an organik) belum sepenuhnya terjamin sampai ke tingkat petani, sementara pupuk organik belum bisa di andalkan sebagai substitusi pupuk an organik; (iii) masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dane pengolahan serta pemasaran hasil pertanian, masih menjadi kendala yang menyebabkan penurunan kemampuan penyediaan pangan (iv) Terbatasnya infrastruktur irigasi (teknis/setengah teknis/ sederhana) yang potensial dan dapat diandalkan; (v) kerusakan yang disebabkan oleh kekeringan maupun

banjir semakin tinggi karena fungsi perlindungan alamiah telah sangat berkurang.

Komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah yang telah disepakati oleh provinsi sebesar 200 ton dan kabupaten/kota sebesar 100 ton sejauh ini masih di tingkat provinsi yang memenuhinya, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota masih belum seluruhnya memfasilitasinya.

2) Aspek Distribusi Pangan

Tidak stabilnya harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan antara lain ; (i) Kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan; (ii) Pembinaan distribusi dan harga pangan melalui pelaksanaan movev harga pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan, penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis yang akurat masih terbatas ; (iii) belum terpolanya distribusi bahan pangan antar kabupaten/kota dimana arus keluar masuk bahan pangan melalui banyak pintu-pintu masuk yang tersebar pada kabupaten/kota yang berada pada daerah perbatasan dengan Provinsi tetangga, sehingga menyulitkan dalam pemantauan distribusi bahan pangan tersebut, hal ini mengakibatkan fluktuasi harga pangan; (iv) belum ada jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali gabah/ beras; (v) Bervariasinya kemampuan distribusi pangan antar wilayah, antar musim yang menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan agar tersedia sepanjang waktu di konsumen; (vi) Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan.

3) Aspek Konsumsi Pangan

Konsumsi dan keamanan Pangan Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah yang dicirikan dengan pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman. Sampai saat ini konsumsi beras per kapita masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 111,00 kg/kapita/tahun. Dengan jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah, serta persaingan pemanfaatan sumberdaya yang semakin ketat, maka dominasi beras dalam pola konsumsi pangan ini cukup memberatkan upaya pemantapan ketahanan pangan berkelanjutan yang tertumpu pada sumberdaya wilayah (lokal). Permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi dan diantisipasi dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman adalah : (1) keterbatasan kemampuan ekonomi; (2) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan dan gizi; (3) keterbatasan kemampuan mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai pangan alternatif pengganti beras (substitusi); (4) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan; (5) pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum; (6) pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan

prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, serta (7) pengelolaan konsumsi dalam rumah tangga yang kurang diperhatikan kebutuhan gizi setiap individu anggotanya. Belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat sehingga konsumsi pangan masih terpaku pada komoditas tertentu. Konsumsi pangan umbi-umbian masih rendah sedangkan konsumsi beras semakin menjadi pangan strategis di masyarakat sehingga diperlukan perubahan pola pikir melalui sosialisasi gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan di masyarakat dengan pemenuhan sumber karbohidrat selain beras. Penganekaragaman pangan dapat berjalan dengan baik melalui dukungan dari stakeholder yang terkait melalui koordinasi yang baik.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah

Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 sebagaimana yang telah dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 adalah : "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera".

Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual.

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersediannya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpeliharaan dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, juga telah dijabarkan misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yaitu : 1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab, dan berbudaya berdasarkan falsafah" Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi

Kitabullah; 2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional; 3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi; 4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah; 5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi yang terkait dengan urusan pangan adalah misi keempat, yaitu “Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan yang Tangguh, Produktif, dan Berdaya Saing Regional dan Global, dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Pembangunan Daerah”, dan tujuan kedua, yaitu “Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani”. Dalam upaya mewujudkan Misi ke 4 (empat) dan tujuan ke 2 (dua) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib pangan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dan 2). Program Diversifikasi Pangan. Untuk mendukung visi, misi dan program gubernur tersebut, maka tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan hal dimaksud adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan, dengan fungsi; 1). Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan, 2). Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang Ketahanan Pangan, 3). Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan, 4). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, maka Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun kedepan berusaha mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Barat. Dalam mendukung pencapaian visi dan misi gubernur, akan ditemui faktor-faktor penghambat serta faktor-faktor pendorong yang akan mempengaruhinya sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1.
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pangan Terhadap
 Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Daerah			
	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Harga bahan pangan masih fluktuatif	Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	- Sudah adanya program peningkatan produksi pangan - Ketersediaan komoditas pangan surplus
	- Program Diversifikasi Pangan	- Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (PPH 83,7) - Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius	Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal

Untuk permasalahan pelayanan terkait dengan masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras, faktor penghambatnya adalah teknologi pangan tepat guna masih terbatas sehingga pemanfaatan teknologi pangan tepat guna kedepan harus lebih ditingkatkan.

Permasalahan karena pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (PPH 83,7) serta Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius, faktor penghambatnya adalah Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga perlu didukung program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) serta sosialisasi keamanan pangan pada masyarakat. Dengan faktor pendorong tersedianya keanekaragaman pangan lokal diharapkan B2SA dapat segera terwujud.

Harga bahan pangan sampai saat ini masih fluktuatif sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) namun HPP tersebut masih terbatas pada komoditas pangan tertentu, ini merupakan permasalahan dan faktor penghambat. Namun faktor pendorongnya adalah ketersediaan pangan Sumatera Barat yang selalu surplus kecuali untuk kedelai.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah

capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu eselon 1 di Kementerian Pertanian RI yaitu Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, sasaran dan target pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019, serta mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, Kementerian Pertanian RI merumuskan visi pembangunan pertanian melalui ketahanan pangan tahun 2015-2019 yaitu "Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganeekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan".

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 5 (lima) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
4. Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
5. Mewujudkan keamanan pangan segar.

Mengacu kepada arah kebijakan RPJMN 2015-2019 maka arah kebijakan umum dan strategi pembangunan ketahanan pangan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilitasnya harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Tercapainya keamanan pangan segar.

Faktor penghambat ataupun faktor pendorong ditinjau dari renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian merupakan potensi dan tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Secara umum masih cukup tersedia potensi sumberdaya alam dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Sedangkan dari kapasitas sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi, memiliki potensi untuk ditingkatkan, untuk mendukung pengembangan ketersediaan dan distribusi pangan serta perbaikan konsumsi pangan.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat, berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian sebagaimana telah diuraikan pada sub bab diatas, dapat dilihat keterkaitan kinerja antara Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.3.1.
Komposisi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pangan
Provinsi Sumatera Barat
Terhadap Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian RI

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BKP Prov. Sumbar	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		96,32
2	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan (%)		1
3	Stabilnya harga pangan (gabah/beras) ditingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP
4	Stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen	CV < 5 %	CV < 5 %
5	Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2.000	2.150
6	Konsumsi Protein (gr/kap/hr)	52	57
7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87	92,5
8	Keamanan Pangan Segar (uji lab)	80 %	Dibawah ambang batas
9	Mempertahankan Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)	2.400	
10	Mempertahankan Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)	63	
11	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Ton)	522	
12	Teratasinya masyarakat rawan pangan (KK)	632	
13	Penanganan daerah rawan pangan (32 Nagari/Desa) (%)	90	
14	Meningkatnya sertifikasi keamanan pangan segar (sertifikat prima)	530	

Dari table 3.3.1. terlihat bahwa indikator kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi dalam pencapaian sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, hal ini menunjukkan terdapat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat terhadap sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Provinsi di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2009-2029 selanjutnya disebut dengan RTRWP dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRWP Sumatera Barat yang bersifat umum disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif provinsi dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRWP juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan zonasi peruntukan.

Penetapan zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi. Indikasi arahan peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan indikasi arahan peraturan zonasi yang melengkapi rencana umum tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah disusun. Program Perwujudan Pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang terdapat pada lampiran Indikasi Program Tahun 2009-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4.1.
Indikasi Pusat Kegiatan Pengembangan Pertanian
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 - 2029

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan										Sumber Dana	Pelaksana	
				2009	2010	2011	2012	2013	14-18	19-23	24-29					
3	Pengembangan Kawasan Pertanian dan	Perluasan lahan padi sawah beririgasi teknis seluas 53.020 Ha	DI Batang Anai II, DI Inderapura, DI Batang Tongar, DI Batang Batahan, DI Panti Rao, DI Batanghari												APBD SWASTA	Dinas Pertahor
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Pertanian	Peningkatan produktifitas lahan padi sawah	lahan padi sawah yang ada di Provinsi Sumatera Barat.												APBD	Dinas Pertahor/ PemKab/Kota
		Pengembangan komoditi sayuran (seperti kubis, kentang, bawang merah, cabe)	Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman Barat, Kota Pariaman												APBD	Dinas Pertahor/ PemKab/Kota
		Pengembangan buah-buahan (seperti : manggis, pisang, jeruk, melinjo, markisah, alpokat, salak)	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Lima puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Kep. Mentawai, Kota Pariaman,												APBD	Dinas Pertahor/ PemKab/Kota
		Pengembangan Tanaman hias dan obat-obatan	Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Padang, kota Payakumbuh, Ka. Limapuluh Kota, Kab. Tanah Datar.												APBD	Dinas Pertahor/ PemKab/Kota
		Pengembangan komoditas pertanian organik	Sentra produksi												APBD	Dinas Pertahor/ PemKab/Kota
		Pengembangan kawasan agropolitan	18 kab/kota, khususnya di : Kabupaten Solok, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pasaman												APBN/ APBD	Dinas Pertahor prov/ Kab/Kota
		Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	18 kab/kota												APBN/ APBD	Badan ketahanan pangan prov/ Kab/Kota
		Peningkatan Ketahanan Pangan	18 kab/kota												APBN/ APBD	Badan ketahanan pangan prov/ Kab/Kota

Dari tabel tersebut terlihat bahwa ruang lingkup ketahanan pangan termasuk pada Program Pengembangan Kawasan Pertanian dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Pertanian, dapat dijadikan salah satu upaya pengembangan ketahanan pangan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kawasan sebagai sentra pengembangan produk pangan olahan berbasis sumberdaya lokal, sehingga dapat memberikan dampak kepada masyarakat melalui peningkatan nilai tambah serta memberikan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dari proses KLHS terdapat 5 Isu strategis, yaitu: (1) Alih Fungsi Lahan; (2) Penurunan Kualitas Hutan; (3) Penurunan Kualitas Air; (4) Penurunan Ketersediaan air; dan (5) Pencemaran udara, dan dari hasil kajian pengaruh didapatkan 12 program prioritas yang diperkirakan memiliki pengaruh/dampak

negatif terhadap isu strategis, diantaranya adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Selanjutnya untuk melihat ringkasan KLHS, implikasi terhadap pelayanan Dinas Pangan dan rekomendasi terhadap perumusan program dan kegiatan Dinas Pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.2.
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1	Peningkatan Ketahanan Pangan	- Peningkatan degradasi lahan	Ketahanan Pangan wilayah harus tetap terjaga	Program Peningkatan Ketahanan Pangan harus berwawasan lingkungan dengan memperhatikan :
		- Peningkatan emisi gas rumah kaca dari penggunaan pupuk		- kemampuan dan kesesuaian lahan.
		- Terjadinya konversi hutan		- Mencegah terjadinya alih fungsi lahan pangan serta menjamin ketersediaan lahan dengan mempercepat proses pelaksanaan UU 41 Tahun 2010 tentang LP2B
		- Menurunnya kualitas air dan tanah		- Pengembangan rumah pangan lestari (RPL)
2	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	- Menurunnya kualitas air dan tanah,	- Penurunan Produksi Pangan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis harus berwawasan lingkungan dengan memperhatikan antara lain :
		- Meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK),	- Keamanan produksi pangan (cemaran bahan kimia)	- Melakukan kajian lokasi
		- Terganggunya ekosistem perairan,		- Mengurangi penggunaan bahan kimia untuk pertanian
		- Degradasi vegetasi dan lahan,		- Memperhatikan keseimbangan ekosistem
		- Menurunnya populasi biota perairan,		- Konservasi tanah
		- Terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,		- Menjaga stabilitas produksi secara berkelanjutan
		- Terganggunya aliran tanah, konversi lahan,		- Melaksanakan penelitian secara sistematis dan terarah untuk pengembangan agribisnis yang berkelanjutan
		- Terdampak bahaya penggunaan pestisida dan atau teknologi pertanian umum yang tidak ramah lingkungan. Terjadinya alih fungsi lahan		- Melakukan sosialisasi pada konsumen agar memperhatikan produk pertanian yang ramah lingkungan
		- Menciptakan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak untuk pengembangan sistem pertanian berkelanjutan		

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pangan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pangan ditinjau dari Gambaran pelayanan Dinas Pangan; Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pangan; dan Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pangan, maka dalam pembangunan ketahanan pangan pada

umumnya, dan di Sumatera Barat khususnya terdapat isu-isu strategis yang berkembang saat ini, isu-isu tersebut antara lain ;

- a. Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta belum berkembangnya industri pangan lokal.
- b. Angka kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan namun akses pangan masyarakat belum terjamin.
- c. Alih fungsi lahan cenderung meningkat, mengakibatkan berkurangnya lahan produktif sebagai sumber penyediaan pangan.
- d. Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang Aman, Beragam, Bergizi dan Berimbang.
- e. Tingginya intensitas bencana alam yang berdampak serius terhadap tingkat kerawanan pangan masyarakat.
- f. Masih rendahnya Nilai Tukar Petani dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan ketahanan pangan.
- g. Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat serta masih lemahnya pengawasan keamanan pangan segar.
- h. Ancaman kelaparan global dan ketergantungan pangan dari luar negeri.
- i. Perubahan iklim global, konversi dan degradasi sumber daya lahan dan air.

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pangan

Dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah yang akan dihadapi Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mewujudkannya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan sektor pangan di Sumatera Barat Tahun 2016-2021 berangkat dari landasan visi :

“Menjadi Institusi yang handal dalam memantapkan kemandirian pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal.”

Visi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat diatas mempunyai makna sebagai berikut:

- Handal : Mengandung makna bahwa mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan.
- Kemandirian pangan : Mengandung makna bahwa kemampuan provinsi Sumatera Barat dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.
- Sumber daya lokal : Mengandung makna bahwa pangan, baik dari sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya masyarakat provinsi Sumatera Barat.

Misi

Guna mewujudkan visi Dinas Pangan Tahun 2016 – 2021 di atas, maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu:

- a. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan mutu pangan masyarakat yang aman berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan serta penanganan kerawanan pangan.
- c. Mewujudkan sistem distribusi pangan dan memupuk cadangan pangan untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- d. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan kemandirian pangan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Pangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, seimbang dan aman) berbasis sumberdaya lokal.
- b. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan pangan serta antisipasi kerawanan pangan.
- c. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan utama.
- d. Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur dalam mewujudkan Kemandirian Pangan

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pangan masyarakat.
- b. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
- c. Stabilitasnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen.
- d. Meningkatnya tata kelola organisasi

Tabel 4.2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, seimbang dan aman) berbasis sumberdaya lokal	1 Meningkatkan Kualitas Pangan Masyarakat	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	84	84,6	85,2	85,8	86,4	87,0
2	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan pangan serta antisipasi kerawanan pangan	2 Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	2 Ketersediaan Pangan Utama Beras	Ton	1.495.021	1.512.953	1.530.178	1.546.987	1.563.350	1.578.984

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					1	2	3	4	5	6
3	Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan utama	3 Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen	3 Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen							
			a. Beras	CV	≤ 5	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
			b. Cabe Merah	CV	-	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25
			4 Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP
4	Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur dalam mewujudkan Kemandirian Pangan	4 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	5 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	B	B
			6 Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas	%	95	95	95	95	95	95

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui upaya pengolahan pangan berbahan-baku tepung umbi-umbian dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya.
2. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan .
3. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga.
4. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan;.
5. Pelaksanaan dan Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan
6. Meningkatkan SDM Aparatur Dinas Daerah

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal.

2. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.
3. Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
4. Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien.
5. Mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat.
6. Menjaga stabilitas Harga Pangan.
7. Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan kerjasama program secara efektif dan efisien.
8. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi ketahanan pangan.
9. Meningkatkan pengelolaan keuangan (akuntansi) dan rumah tangga kantor.
10. Meningkatkan pengelolaan organisasi tatalaksana

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pangan dalam 5 (lima) tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel 4.2.2 di bawah ini :

Tabel 4.2.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Menjadi Institusi yang handal dalam memantapkan kemandirian pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal			
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi I	Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan mutu pangan masyarakat yang aman berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal			
	1 Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) berbasis sumberdaya lokal	1 Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	1 Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui upaya pengolahan pangan berbahan-baku tepung umbi-umbian dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya;	1 Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal;
Misi II	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan serta penanganan kerawanan pangan			
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	2 Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan pangan serta antisipasi kerawanan pangan	2 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	1 Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan	1 Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.

Misi III	Mewujudkan sistem distribusi pangan dan memupuk cadangan pangan untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan			
	3 Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan utama	3 Stabilitasnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen	1 Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga.	1 Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk miskin;
			2 Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan;	2 Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien;
				3 Mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat
				4 Menjaga stabilitas Harga Pangan
Misi IV	Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan kemandirian pangan			
	4 Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur dalam mewujudkan Kemandirian Pangan	4 Meningkatnya tata kelola organisasi	1 Pelaksanaan dan Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan	1 Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan kerjasama program secara efektif dan efisien
			2 Meningkatkan SDM Aparatur Dinas Pangan Daerah	2 Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi ketahanan pangan
				3 Meningkatkan pengelolaan keuangan (akuntansi) dan rumah tangga kantor
				4 Meningkatkan pengelolaan organisasi tatalaksana

BAB 5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

5.1. Program Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

Program-program pembangunan ketahanan pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 meliputi 2 Program, yaitu (1). Program Ketahanan Pangan, (2). Program Diversifikasi Pangan, dan (3). Program penunjang sebagai berikut :

5.1.1. Program Diversifikasi Pangan

Program Diversifikasi pangan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan segar, distribusi dan pemberdayaan di tingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. Hal ini terlihat dengan Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

5.1.2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memfasilitasi upaya koordinasi, pemantauan, pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan dan pengembangan di bidang ketahanan pangan. Sasaran yang ingin dicapai yaitu: (1) Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan; (2) Meningkatnya kualitas pengkajian, pemantauan dan pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi

pangan; serta (3) Meningkatnya peran kelembagaan ketahanan pangan masyarakat.

Melalui program ini diharapkan dapat dipertahankannya ketersediaan pangan masyarakat, teratasinya masyarakat rawan pangan, meningkatnya penanganan masyarakat rawan pangan, Stabilisasi harga bahan pangan utama (beras dan cabe merah) di tingkat konsumen, serta stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen.

5.1.3. Program Belanja Pokok

Disamping program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan, juga terdapat program-program penunjang yang mendukung pelaksanaan program ini. Program-program belanja pokok tersebut meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset

Kegiatan utama pada program-program Belanja Pokok meliputi: operasional pelayanan kantor, penyediaan sarana dan prasarana penunjang kerja, peningkatan SDM aparatur, serta pelaporan kinerja dan keuangan.

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pangan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.2.1 berikut.

Tabel 5.2.1

Tabel T-IV.C.28

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	T a r g e t										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		OPD Penanggung jawab	Lok		
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				T	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
									10.046		10.607		11.272		12.725		13.928		16.414		21.062	Dinas Pangan Sumbar	Padang	
						Belanja Langsung Urusan			6.736		6.905		8.945		10.380		11.573		14.024		15.020			
1	Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, seimbang dan aman) berbasis sumberdaya lokal	Beragamnya konsumsi pangan masyarakat	1 Meningkatkan kualitas pangan masyarakat	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				83,70%	84,00%	805	84,60%	975	85,20%	1.840	85,80%	1.900	86,40%	1.925	87,00%	2.042	87,00%	2.042		
						I Program Diversifikasi Pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Sumatera Barat	83,70%	84,00%	805	84,60%	975	85,20%	1.840	85,80%	1.900	86,40%	1.925	87,00%	2.042	87,00%	2.042		
						KEGIATAN																		
						1 Pemanfaatan pekarangan dalam pengembangan pangan (P-KRPL)	Jumlah Kelompok/UKM pengelola	315 klp	25 klp	232	60 klp	225	30 klp	220	30 klp	350	30 klp	375	30 klp	375	30 klp	375		
						2 Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Percepatan Pengankaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Jumlah masyarakat yang dilatih dan dibina dalam pengankaragaman pangan	400 org	38 Orang	106	38 Orang	225	150 org	75	150 org	150	150 org	150	150 org	150	150 org	150		
						3 Lomba Cipta Menu Konsumsi Pangan B2SA Tingkat Provinsi	Terlaksananya lomba cipta menu tingkat provinsi yang diikuti oleh TP-PKK Kab/Ko se Sumatera Barat	1 kali	1 kali	131	1 kali	225	1 kali	200	1 kali	300	1 kali	300	1 kali	300	6 kali	300		
						4 Pemantauan, Sosialisasi dan Analisa Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH)	Tersedianya data dan informasi hasil analisis pola konsumsi pangan masyarakat	-	-	-	-	-	1 lap	80	1 Lap	300	1 Lap	300	1 Lap	300	1 Lap	300		
						5 Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal	Jumlah kelompok yang dibina	40 klp	4 unit/klp	336	20 unit/klp	300	20 unit/klp	500	20 unit/klp	150	50 unit/klp	150	60 unit/klp	150	60 unit/klp	150		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		OPD Penanggung jawab	Lok				
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				T	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
						21	Pemantauan Produksi dan Ketersediaan Pangan Wilayah Sumatera Barat	Pelaksanaan Koordinasi	19 Prov/Kab/ Kota	19 Prov/Kab/ Kota	63	19 Prov/Kab/ Kota	100	19 Prov/Kab/ Kota	60	19 Prov/Kab/ Kota	100	19 Prov/Kab/ Kota	100	19 Prov/Kab/ Kota	100				
						22	Penyusunan Database Ketahanan Pangan	Tersusunnya buku database ketahanan pangan Sumatera Barat	19 kab/kota	19 kab/kota	150	19 kab/kota	150	19 kab/kota	60	19 kab/kota	61	19 kab/kota	61	19 kab/kota	72	19 kab/kota	72		
						23	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD	Terlaksananya monev program / kegiatan ketahanan pangan di kabupaten / kota	19 kab / kota	19 kab / kota	183	19 kab / kota	185	19 kab / kota	150	19 kab / kota	150	19 kab / kota	150	19 kab / kota	165	19 kab / kota	165		
						24	Penilaian Adikarya Pangan Nusantara	7 Kategori (Kelompok dan Aparat) yang berprestasi untuk terwujudnya peningkatan motivasi kelembagaan masyarakat dan aparat pemantapan ketahanan pangan	7 kategori	7 kategori	173	7 kategori	130	7 kategori	200	7 kategori	200	7 kategori	200	7 kategori	200	7 kategori	200		
						25	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya pertemuan koordinasi DKP yang dapat merumuskan kebijakan ketahanan pangan daerah	2 kali pertemuan	2 kali pertemuan	500	2 kali pertemuan	100	2 kali pertemuan	300	1 kali pertemuan	300	2 kali pertemuan	300	2 kali pertemuan	350	2 kali pertemuan	350		
						26	Pengembangan fungsional analisis ketahanan pangan	Terlaksananya pendidikan/pelatihan dan pengembangan SDM fungsional Analisis Ket Pangan	-	-	-	-	-	4 kali bimbingan teknis	250	5 kali bimbingan teknis	250	5 kali bimbingan teknis	250	5 kali bimbingan teknis	300	5 kali bimbingan teknis	300		
						27	Diseminasi hasil kajian pengembangan pangan	Terlaksananya analisa kajian komoditi pangan dan diseminasi hasil kajian									1 kajian	69	1 kajian	70	1 kajian	70			

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	T a r g e t										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		OPD Penanggung jawab			
									2016		2017		2018		2019		2020		2021			T	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						38	Koordinasi Penyediaan dan Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Sumatera Barat	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	253,8 ton	22 ton	258	100 ton	1.000	100 ton	950	100 ton	1.000	100 ton	1.000	100 ton	1.000	775,8 ton	1.000	
						39	Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat	Lumbung Pangan Masyarakat Yang Dibina	49 kelompok	49 kelompok	142	45 kelompok	125	49 kelompok	50	30 kelompok	50	35 kelompok	50	40 kelompok	60	40 kelompok	60	
						40	Koordinasi dan pengawasan pangan pokok	Terlaksananya koordinasi dan pengawasan penyaluran pangan pokok di kab/kota						19 Kab/kota	100					19 Kab/kota	100	19 Kab/kota	100	
3	Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan utama	Terdiptanya sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien	3 Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen	3 Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen							790		290		725		1.779		1.978		3.365		2.435	
				a. Beras				CV ≤ 5	CV ≤ 5		CV ≤ 10		CV ≤ 10		CV ≤ 10									
				b. Cabe Merah				-	-		CV ≤ 25		CV ≤ 25		CV ≤ 25									
				4 Stabilisasi harga bahan pangan utama (gabah dan beras) di tingkat produsen				≥ HPP	≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP	
							KEGIATAN																	
						41	Pemantauan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan	Jumlah Kabupaten / kota pemantauan distribusi dan akses pangan	18 kab ko	18 kab ko	100	12 kab ko	90	19 kab ko	50	19 kab ko	100	19 kab ko	100	19 kab ko	150	19 kab ko	150	
						42	Koordinasi Pemantauan Harga dan Pengembangan Pangan JIH Wilayah	Jumlah kabupaten / kota	18 kab/ko	19 kab/ko	150	19 kab/ko	100	19 kab/ko	50	19 kab/ko	100	19 kab/ko	100	19 kab/ko	100	19 kab/ko	100	
						43	Pengembangan dan Perluasan Pasar Gapoktan	Terjalinya kemitraan gapoktan dengan pelaku usaha luar Provinsi	2 kali	2 kali	160	2 kali	100	2 kali	50	2 kali	100	2 kali	100	2 kali	150	14 kali	150	
						44	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Tersalurkannya bantuan RMU dan kelengkapannya kepada gapoktan	1 unit	1 unit	380	-	-	10 unit	175	10 unit	700	10 unit	700	10 unit	1.385	42 unit	1.385	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		OPD Penanggung jawab	Lok			
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				T	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
						45	Pengembangan Panel Harga Pangan Pokok	Data Informasi Harga Pangan	-	-	-	18 kab / kota	-	18 kab / kota	50	18 kab / kota	150	18 kab / kota	150	18 kab / kota	150	18 kab / kota	150		
						46	Bazar / pasar murah bahan pangan	terlaksananya bazar / pasar murah bahan pangan	-	-	-	1 kali	50	1 kali	100	1 kali	100	1 kali	150	5 kali	150				
						47	Pembinaan dan Pengembangan kegiatan usaha pangan masyarakat/To ko Tani Indonesia	Terbinanya dan berkembangnya kegiatan usaha pangan masyarakat/To ko Tani Indonesia				14 gapoktan	100					14 gapoktan	150	14 gapoktan	150				
						48	Pemantauan dan koordinasi harga pangan menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN)	Terselenggaranya pemantauan harga pangan menjelang HBKN				18 kab/kota	100					18 kab/kota	100	18 kab/kota	100				
						49	Penyusunan prognosa neraca harga pangan	Tersedianya data prognosa neraca harga pangan untuk mengantisipasi terjadinya gejala harga pangan				18 kab/kota	100					18 kab/kota	100	18 kab/kota	100				
						50	Distribusi bahan pangan ke masyarakat	Terlaksananya penjualan bahan pangan pokok						1 laporan	264	1 laporan	364	1 laporan	450		450				
						51	pengadaan pasokan bahan pangan							1 laporan	265	1 laporan	364	1 laporan	480		480				
							Belanja Langsung Pokok																		
4	Meningkatkan koordinasi dan peran aparaturnya dalam mewujudkan Kemandirian Pangan	Tersusunnya laporan keuangan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, berkualitas dan transparan	4 Meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pelaporan evaluasi kinerja dan sistem keuangan	5 Nilai Evaluasi AKIP				1 dokumen	B	3.309	B	3.702	B	2.327	B	2.345	B	2.355	B	2.390	B	6.042			
						III	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	100	1.300	100	1.791	100	1.349	100	1.359	100	1.359	100	1.359	100	1.760		
							KEGIATAN																		
						1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat untuk 1 tahun	12 bulan	12 bulan	33	12 bulan	43	12 bulan	25	12 bulan	30	12 bulan	30	12 bulan	30	12 bulan	30		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target															Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		OPD Penanggung jawab	Lok		
									2016		2017		2018		2019		2020		2021		T	Rp							
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
						2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya pelayanan komunikasi, air dan listrik keperluan kantor selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	205	12 bulan	305	12 bulan	300	12 bulan	300	12 bulan	300	12 bulan	300	12 bulan	300	12 bulan	300				
						3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah selama 1 tahun	-	-	-	-	-	1 Tahun	40	1 Tahun	40	1 Tahun	40	1 Tahun	40	1 Tahun	40	1 Tahun	40				
						4	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Bersihnya kantor/gedung selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	119														12 bulan	119			
						5	Penyediaan Jasa kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor	Tersedianya sarana kebersihan, sopir dan keamanan kantor selama 1 tahun	-	-	-	12 bulan	433	12 bulan	464	12 bulan	469	12 bulan	469	12 bulan	469	12 bulan	469	12 bulan	469	12 bulan	469		
						6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	50	12 bulan	50	12 bulan	25	12 bulan	25	12 bulan	25	12 bulan	25	12 bulan	25	12 bulan	25	12 bulan	25		
						7	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	59	12 bulan	60	12 bulan	25	12 bulan	25	12 bulan	25	12 bulan	25	12 bulan	25	12 bulan	25	12 bulan	25		
						8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk 1 tahun	12 bulan	12 bulan	18	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15								
						9	Penyediaan Bahan Bacaan bahan Pustaka & peraturan perUU	Terlaksananya bahan bacaan surat kabar	12 bulan	12 bulan	40	12 bulan	21	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15		
						10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	32	1 Tahun	32	1 Tahun	15	1 Tahun	15	1 Tahun	15	1 Tahun	15	1 Tahun	15	1 Tahun	15	1 Tahun	15		
						11	Rapat rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	12 bulan	12 bulan	447	12 bulan	530	12 bulan	400	12 bulan	400	12 bulan	400	12 bulan	400	12 bulan	400	12 bulan	400	12 bulan	400		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		OPD Penanggung jawab	Lok				
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				T	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
						12	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Tersedianya jasa publikasi selama 1 tahun	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	10	1 Tahun	10	1 Tahun	10	1 Tahun	10				
						13	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Terlaksananya penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental aparatur	12 bulan	12 bulan	16	12 bulan	20	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15			
						14	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Terlaksananya pengamanan kantor Dinas Pangan Prop. Sumbang	5 orang	5 orang	162	5 orang	162								5 orang	162				
						15	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya sopir Kantor Dinas Pangan Prop. Sumbang	4 orang	4 orang	120	4 orang	120								4 orang	120				
						IV	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100	100	1.549	100	1.450	100	511	100	501	100	511	100	516	100	3.767			
							KEGIATAN																			
						1	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi di Kantor Dinas Pangan Sumbang		8 unit	91	9 unit	150	1 paket	50	1 paket	40	1 paket	50			1 paket	50			
						2	Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi	Terlaksananya pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Dinas Pangan Sumbang		2 unit	42											2 unit	42			
						3	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional secara berkala		6 unit	70	29 unit	135	30 unit	75	30 unit	75	12 bulan	75	12 bulan	50	12 bulan	50			
						4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan komputer, AC dan peralatan kantor lainnya		12 bulan	40	12 bulan	40	12 bulan	30	12 bulan	30	12 bulan	30	12 bulan	24	12 bulan	24			
						5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan kantor	Terpeliharanya sarana peralatan dan perlengkapan kantor									12 bulan	20	12 bulan	10	12 bulan	10				

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		OPD Penanggung jawab	Lok		
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				T	Rp
									Target	Rp	Target	Rp												
						3	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan	Terlaksananya penatausahaan keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan Dinas Pangan Sumbar		12 bulan	40	12 bulan	40	12 bulan	45	12 bulan	45	12 bulan	45	12 bulan	45			
						4	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD	Terlaksananya penataan usaha keuangan Dinas Pangan Sumbar		12 bulan	100	12 bulan	100	12 bulan	100	12 bulan	105	12 bulan	105	12 bulan	105			

BAB 6. INDIKATOR KINERJA DINAS PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Pengantar

Indikator Kinerja Dinas Pangan Pangan Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pangan Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan strategi dan kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang diamanatkan khususnya kepada Dinas Pangan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab III, misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Bidang Pangan adalah misi ke 4 yaitu “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Daerah”. Dari misi ke 4 ini yang menjadi tujuan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani. Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pangan sampai dengan tahun 2021.

Berdasarkan yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Meningkatnya skor pola pangan harapan (PPH).
- b. Mempertahankan ketersediaan pangan minimal terhadap energi dan protein.
- c. Meningkatnya jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi.

6.2. Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 6.2.1

Indikator Kinerja Dinas Pangan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				1	2	3	4	5	6	
1	Ketersediaan Energi	Kkal/kap /hari	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2	Ketersediaan Protein	Gram/kap /hari	63	63	63	63	63	63	63	63
3	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumbar	Ton	253,8	22	100	100	100	100	100	675,8

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				1	2	3	4	5	6	
4	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	Ton	1.433.975	1.495.021	1.512.953	1.530.178	1.546.987	1.563.350	1.578.984	1.578.984
5	Meningkatnya penanganan masyarakat rawan pangan pada 32 nagari	%	32 Nag/Desa	0	20	40	60	80	100	100
6	Teratasinya masyarakat rawan pangan	KK	178	86	810	1.000	1.000	1.000	1.000	4.896
7	Stabilisasi harga bahan pangan utama (beras) di tingkat konsumen	CV	5	5	10	10	10	10	10	10
8	Stabilisasi harga bahan pangan utama (cabe merah) di tingkat konsumen	CV	-	-	25	25	25	25	25	25
9	Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen	HPP	HPP	HPP	HPP	HPP	HPP	HPP	HPP	HPP
10	Meningkatnya sertifikasi keamanan pangan segar (sertifikat prima)	Sertifikat	172	30	100	100	100	100	100	702
11	Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Buah	-	10	10	10	10	10	10	60
12	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat	%	75	75	76	77	78	79	80	80
13	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	83,7	84	84,6	85,2	85,8	86,4	87	87
14	Konsumsi Energi	Kkal/kap /hari	2.000	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
15	Konsumsi Protein	Gram/ kap /hari	52	52	57	57	57	57	57	57
16	Ketersediaan pangan	Kg/kap/thn	275,96	284,25	284,31	284,31	284,31	284,31	284,31	284,31